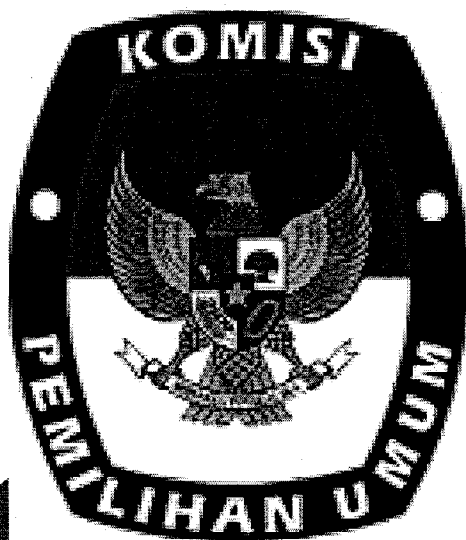




LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

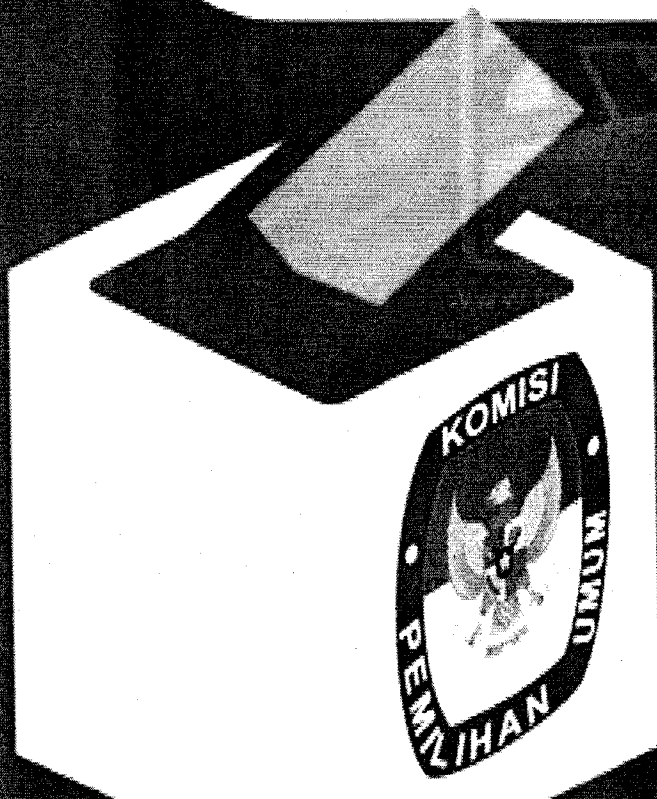
INSTANSI

PEMERINTAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

satu
suara
untuk bangsa



Sebagai insan muda penerus bangsa,
kita juga punya hak untuk bersuara.
Ayo, gunakan satu suara kita sebaik
mungkin untuk Indonesia tercinta.

Distribusi
Februari 2016

KPU PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Tenggilis No. 1 – 3 Surabaya
Telp. 031 – 8484825, 27, 28
Fax. 031 – 8484826

KATA PENGANTAR

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, system anggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Pelaporan Kinerja mengamanatkan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya kepada Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, KPU Provinsi Jawa Timur yang merupakan lembaga hirarkhies, sebagai salah satu unit eselon II mandiri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, diwajibkan untuk menyusun LAKIP.

LAKIP KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ini merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis KPU tahun 2015 - 2019, yang memuat kegiatan-kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, dan PKPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai media bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada *stakeholders*, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Timur, baik keberhasilan maupun kegagalannya selama tahun 2015.

LAKIP sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015. Pada bagian perencanaan dan perjanjian kinerja akan menguraikan mengenai rencana strategis tahun 2015 – 2019, yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi tahun 2015. Sedangkan pada bagian akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Jawa Timur akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian, capaian kinerja organisasi tahun 2015, analisis capaian organisasi tahun 2015 dan akuntabilitas keuangan.

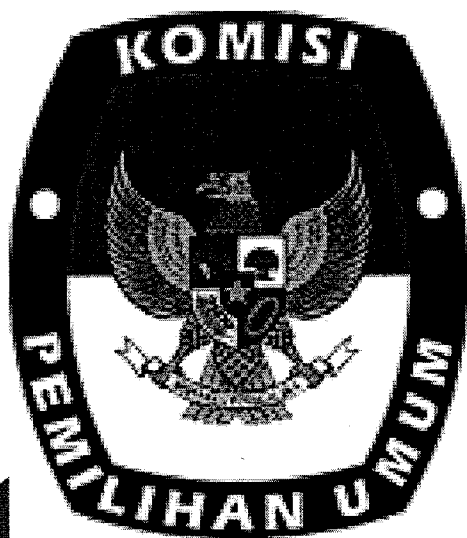
Kami berharap LAKIP tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi *stakeholders* dan sebagai umpan balik bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 20 Januari 2016

SEKRETARIS,



MUHAMMAD EBERTA KAWIMA



RINGKASAN

EKSEKUTIF

satu
suara
untuk bangsa



Sebagai insan muda penerus bangsa,
kita juga punya hak untuk bersuara.
Ayo, gunakan satu suara kita sebaik
mungkin untuk Indonesia tercinta.

Ditstun
Februari 2016

KPU PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Tenggilis No. 1 – 3 Surabaya
Telp. 031 – 8484825, 27, 28
Fax. 031 – 8484826

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat hirarkhis, yang mempunyai pengertian bahwa kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu mengacu kepada kebijakan dari lembaga yang lebih tinggi.

KPU RI dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan, beserta target kinerja selama lima tahun kedepan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yang akan menjadi pijakan bagi semua Satuan Kerja di daerah, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Dalam kurun waktu 2015 – 2019, KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang disertai dengan target kinerja. Dari sasaran strategis yang ditetapkan, telah dijabarkan ke dalam 47 (empat puluh tujuh) sasaran program/kegiatan dan 78 (tujuh puluh delapan) indikator kinerja program/kegiatan. Untuk mengimplementasikan sasaran program/kegiatan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) program utama yang akan menjadi kegiatan KPU, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (07.06.01.01)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (07.01.06.02)
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (07.01.06.06)

LAKIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LAKIP Tahun 2015 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis suatu instansi, tetapi juga suatu catatan terhadap capaian strategis instansi dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama, serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Mengacu pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kepmenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, KPU Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya. yang secara hirarkhis dilaporkan ke KPU Pusat di Jakarta.

LAKIP TAHUN 2015 merupakan penyusunan LAKIP tahun transisi dari Renstra 2010 – 2014 ke Renstra 2015 – 2019. Maksudnya bahwa dalam penyusunan penetapan kinerja (tapkin) tahun 2015 masih menggunakan dasar renstra tahun 2010 – 2014, sedangkan pelaksanaan kinerja sudah menggunakan renstra tahun 2015 – 2019 (perlu adanya review dipertengahan jalan). Selain itu adanya perubahan perundang-undangan yang menjadi pedoman dasar penyusunan LAKIP selama ini. Pada tahun 2015, ada beberapa kegiatan yang penting dalam organisasi KPU Provinsi Jawa Timur, antara lain :

Pertama, pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Sejak triwulan keempat tahun 2014, jabatan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur mengalami kekosongan setelah Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MM, MMT ditugaskan kembali di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Sekretaris Jenderal KPU RI menerbitkan surat nomor 39/SP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang penunjukan Drs. ARIES.GATOT SUBAGYO sebagai pejabat pelaksana tugas (PLT) Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur sampai dengan dilantiknya pejabat definitif.

Memasuki tahun 2015, berdasarkan surat Setjen KPU RI Nomor : 188/SJ/II/2015 tertanggal 13 Pebruari 2015, yang intinya perlu adanya pengisian jabatan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur melalui seleksi terbuka (lelang jabatan). Untuk mendukung pelaksanaan seleksi terbuka (lelang jabatan) tersebut, dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Drs. ARIBOWO, M.Si (Dosen Universitas Airlangga Surabaya).

Dari hasil proses lelang jabatan selama 3 (tiga) bulan, ada 5 (lima) orang pendaftar yaitu :

No (1)	Nama (2)	NIP (3)	Pangkat/Gol (4)	Instansi Asal (5)
1	Drs. AKHMAD SUDJONO, MM	19600510 198603 1 008	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Provinsi Jawa Timur
2	Drs. SUPRAYITNO, M.Si	19580119 198502 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	HM. E. KAWIMA, SH, M.Si	19660623 199403 1 005	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Kab. Jember
4	Drs. MOHAMMAD MAFACHIR, MM	19590122 198603 1 013	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Kab. Tulungagung
5	Drs. Ec. ARIS GATOT SUBAGYO	19590505 199203 1 007	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 15/TIMSEL-SES-PROV/IV/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Peserta yang lolos dan menduduki ranking 3 (tiga) Teratas Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015, diantaranya :

No (1)	Nama (2)	NIP (3)	Pangkat (4)	Instansi Asal (5)
1	Drs. Ec. ARIS GATOT SUBAGYO	19590505 199203 1 007	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Provinsi Jawa Timur
2	Drs. SUPRAYITNO, M.Si	19580119 198502 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	HM. E. KAWIMA, SH, M.Si	19660623 199403 1 005	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Kab. Jember

Dari ketiga calon di atas, untuk menentukan pejabat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur akan diadakan Fit and Propertest oleh KPU RI di Jakarta, sekitar bulan April 2015.

Dan akhirnya, tanggal 12 Mei 2015 diadakan pelantikan terhadap Bapak HM. E. KAWIMA, SH, MSi sebagai Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Sekjen KPU RI Nomor : 298/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, tertanggal 12 Mei 2015 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kab. Jember dan Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur.

Kedua, Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2015 lebih mudahnya disebut dengan **“Pemilihan Serentak”**. Di Jawa Timur sebanyak 19 (Sembilan belas) Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak tersebut, antara lain : Ngawi, Kota Surabaya, Malang, Situbondo, Sumenep, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Banyuwangi, Kota Pasuruan, Jember, Trenggalek, Ponorogo, Kota Blitar, disusul dengan 3 (tiga) daerah yang sebenarnya masa jabatan Bupati baru berakhir tahun 2016, yaitu : Kabupaten Pacitan, Blitar dan Tuban.

Gelaran Pemilihan Serentak tahun 2015, telah ditetapkan KPU RI pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015, sehingga tahapan pemilihan sudah harus dimulai sejak awal tahun 2015, dengan kegiatan persiapan, yaitu penyusunan anggaran pemilihan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemilihan serentak ini.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan serentak ini, akan terjadi perubahan signifikan dibanding dengan pemilihan

sebelumnya, dimana pemerintah (penyelenggara pemilu) menanggung biaya pengadaan bahan-bahan/logistic/alat peraga kampanye bagi peserta pemilihan.

Dalam gelaran pemilu, KPU telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai suatu kebijakan strategis yang harus dilaksanakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Kelima IKU tersebut antara lain :

- a) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;
- b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;
- c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- e) KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

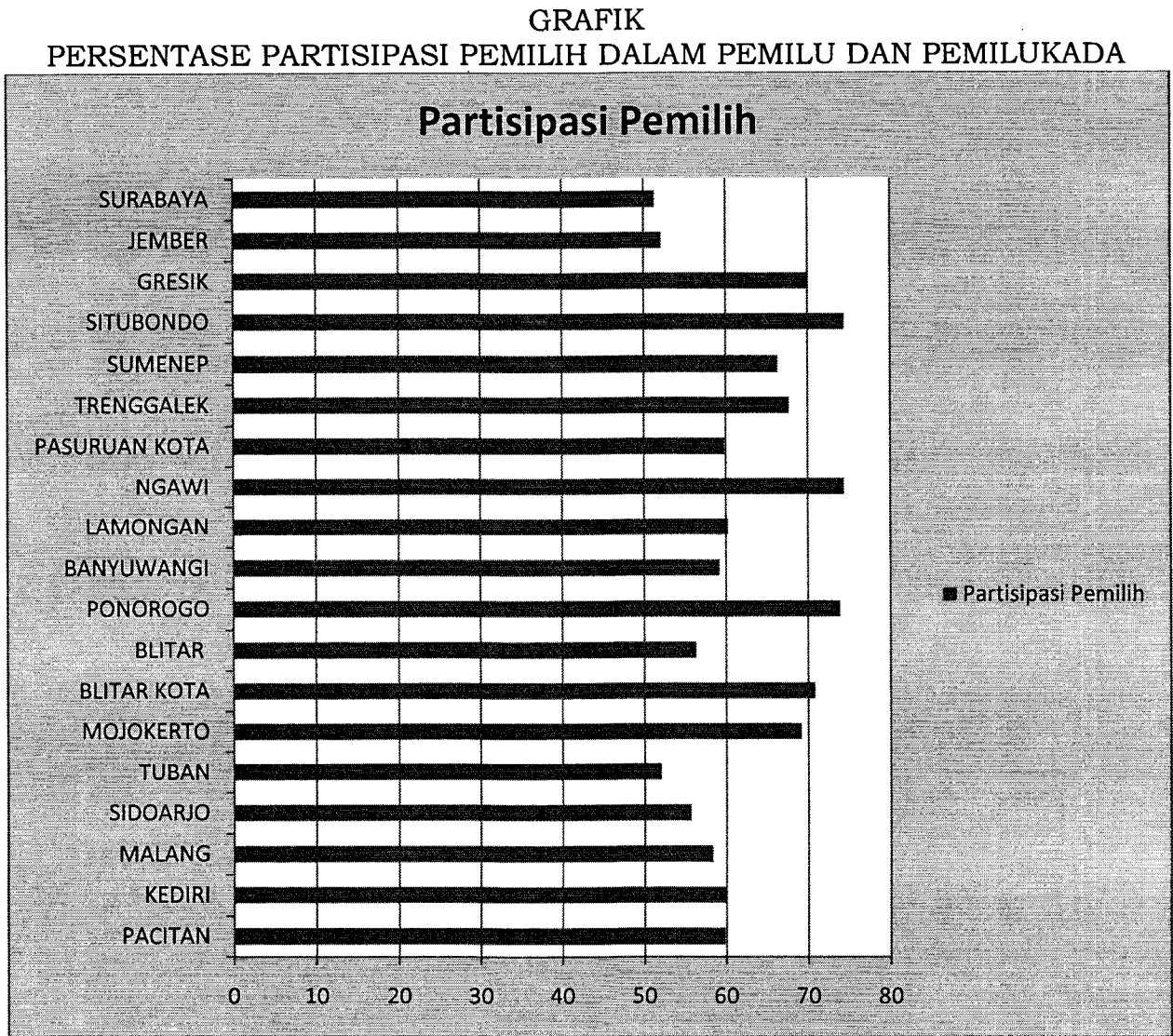
Dari hasil pemilihan serentak di Jawa Timur tahun 2015, terhadap capaian kinerja yang telah dirumuskan oleh KPU melalui indicator kinerja utama di atas, di peroleh gambaran sebagai berikut :

a. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada.

KPU menargetkan partisipasi pemilih setinggi 77,5 % dalam setiap pemilihan, termasuk juga dalam gelaran pemilihan serentak tahun 2015, ternyata di Provinsi Jawa Timur target belum dapat dilampaui oleh Kabupaten/Kota penyelenggara. Secara keseluruhan rata-rata partisipasi pemilih se-Jawa Timur hanya mencapai 62,73 %, sehingga capaian kinerja yang dicapai sebesar 80,94 %.

Partisipasi pemilih tertinggi dicapai oleh KPU Kab. Situbondo yang mampu mendatangkan pemilih sebesar 74,43 %, selanjutnya Kab. Ngawi sebesar 74,38 %, Kabupaten Ponorogo sebesar 73,88 % dan Kota Blitar sebesar 70,81 %.

Sedangkan partisipasi pemilih terendah dicapai KPU Kab. Tuban sebesar 52,03 %, lihat grafik **Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Dan Pemilukada** di bawah ini.

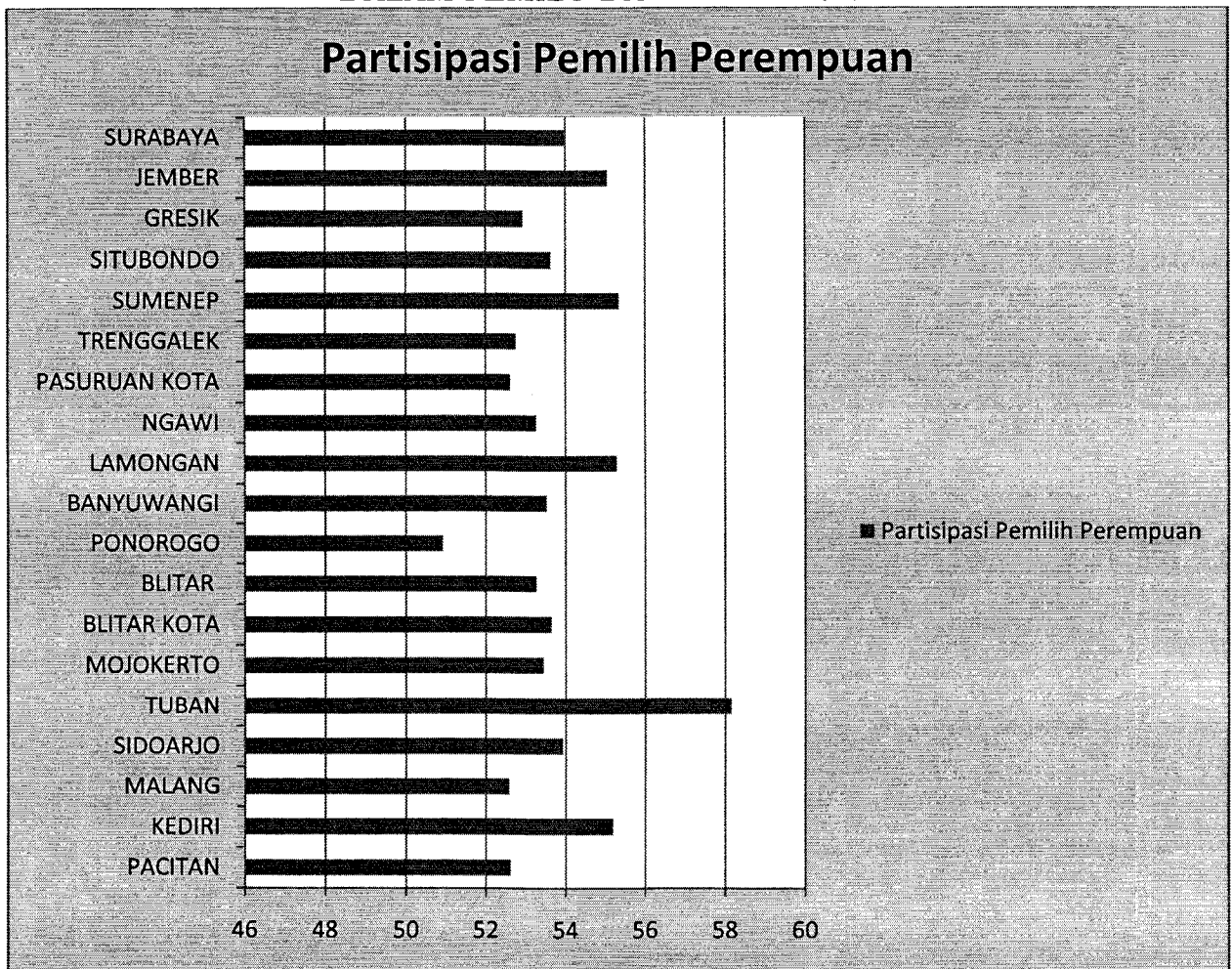


Sumber : KPU Provinsi Jawa Timur 2015, diolah.

b. Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada

KPU menargetkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu sebesar 75 %, dalam gelaran pemilihan serentak tahun 2015, ternyata realitanya target tersebut belum dapat dilampaui oleh Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada. Secara keseluruhan rata-rata partisipasi pemilih perempuan di Jawa Timur hanya berkisar 53,80 %, sehingga capaian kinerja yang dicapai sebesar 71,73 %.

GRAFIK
PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN
DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA



Sumber : KPU Provinsi Jawa Timur 2015, diolah.

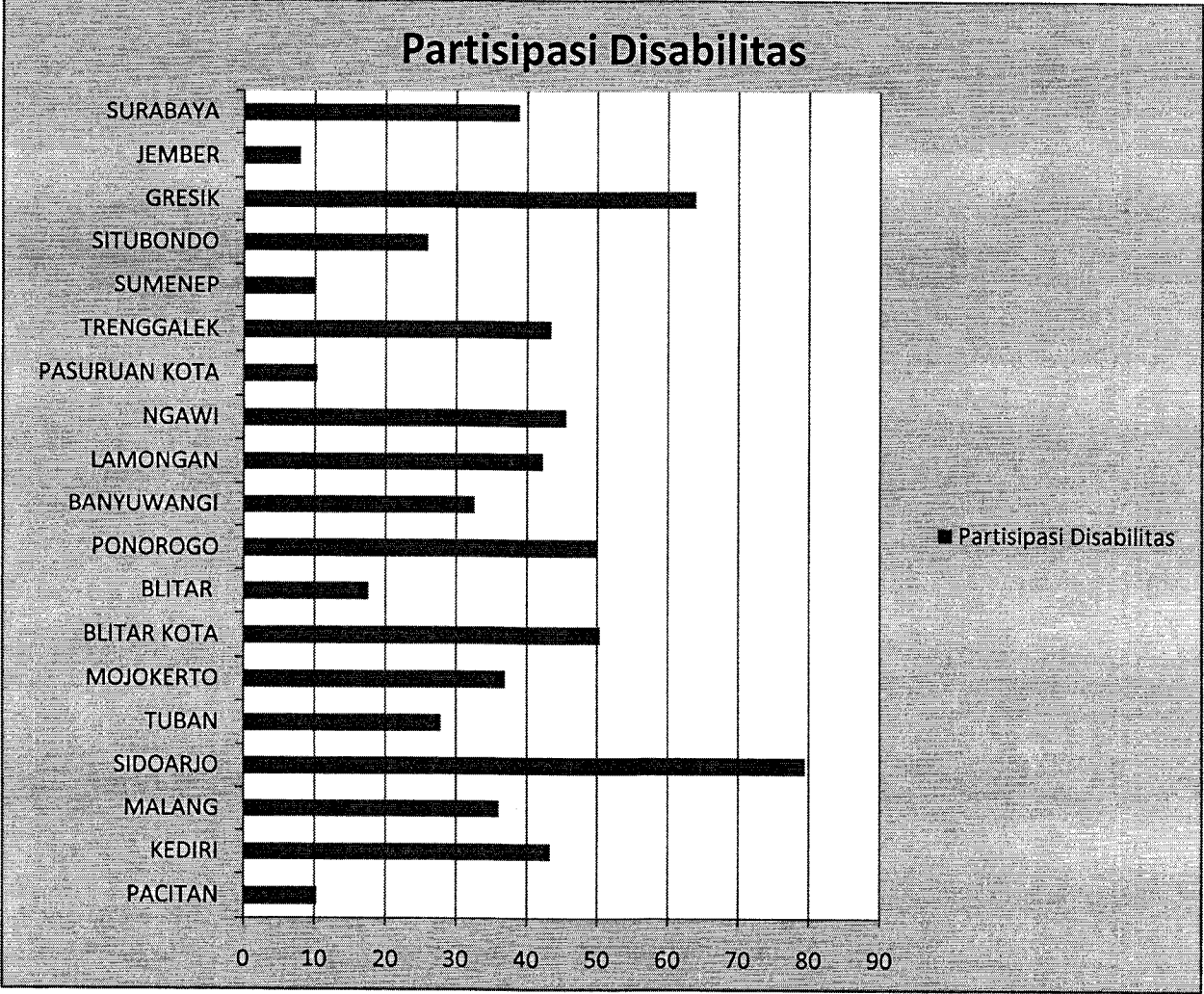
Partisipasi pemilih perempuan tertinggi dicapai oleh KPU Kab. Tuban yang mampu mendatangkan pemilih perempuan sebesar 58,15 %, selanjutnya Kab. Sumenep sebesar 55,35 %, Kabupaten Lamongan sebesar 55,29 % dan Kab. Kediri mencapai 55,19 %. Sedangkan partisipasi pemilih perempuan terendah dicapai KPU Kab. Ponorogo yang hanya mencapai 50,93 %, lihat grafik **Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada** di atas.

c. Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

KPU RI menargetkan partisipasi pemilih disabilitas setinggi 75 % dalam setiap pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 ini, namun secara realitas Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada Serentak belum dapat dilampaui target tersebut. Secara keseluruhan rata-

rata partisipasi pemilih disabilitas di Jawa Timur hanya mencapai 35,40 %, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 47,2 %.

Grafik
PERSENTASE PEMILIH DISABILITAS YANG TERDAFTAR
DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

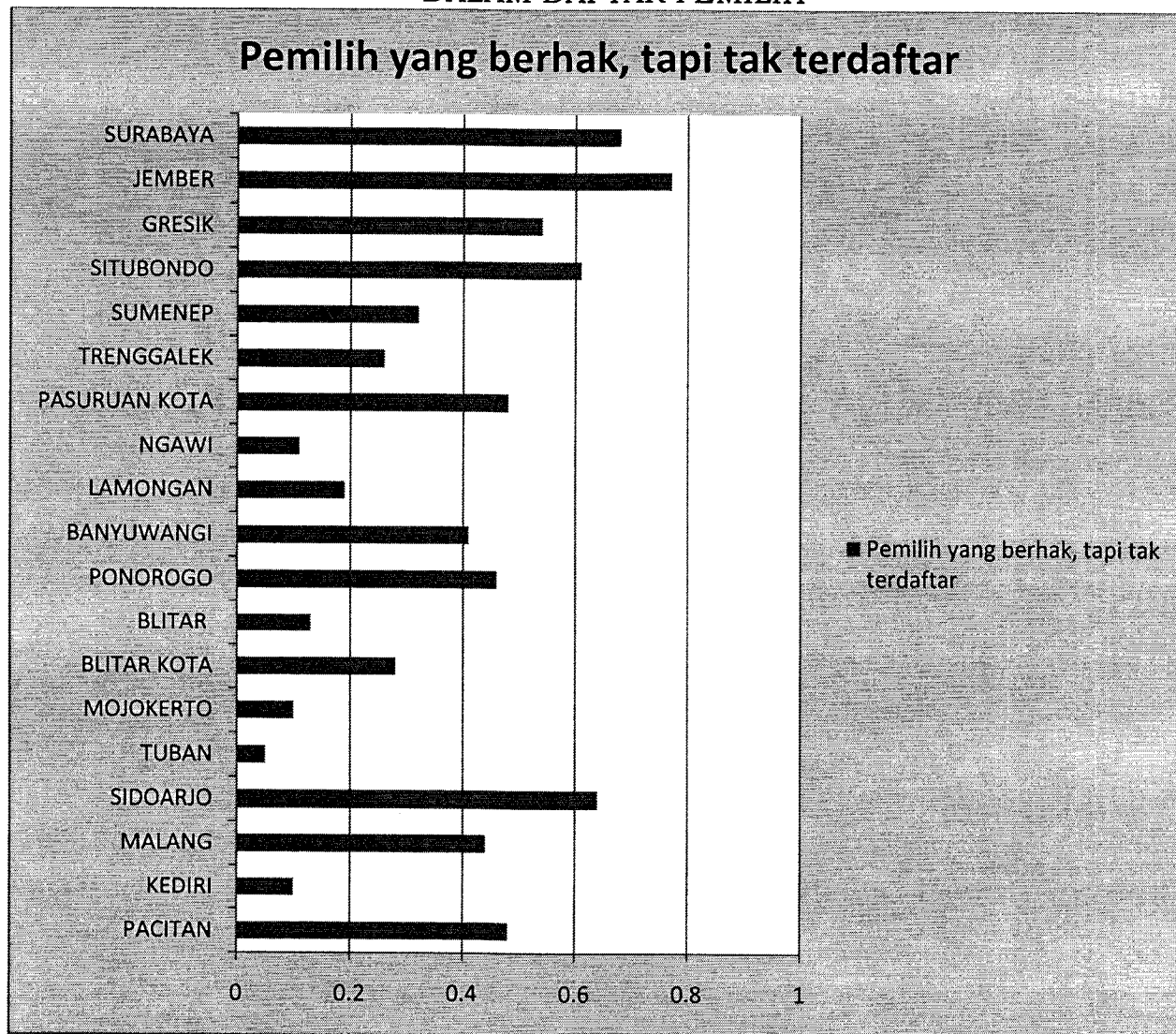


Sumber : KPU Provinsi Jawa Timur 2015, diolah.

Partisipasi pemilih disabilitas tertinggi dicapai oleh KPU Kab. Sidoarjo yang mampu memobilisasi pemilih disabilitas sebesar 79,45 %, selanjutnya Kab. Gresik sebesar 63,79 %, Kota Blitar sekitar 50,43 % dan disusul Kabupaten Ponorogo sebesar 49,86 %. Sedangkan partisipasi pemilih disabilitas terendah dicapai KPU Kab. Jember sebesar 7,98 %, lihat grafik **Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya** di atas.

d. Pemilih yang berhak memilih, tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

GRAFIK
PERSENTASE PEMILIH YANG BERHAK MEMILIH TETAPI TIDAK MASUK
DALAM DAFTAR PEMILIH



Sumber : KPU Provinsi Jawa Timur 2015, diolah.

Renstra KPU telah menargetkan partisipasi pemilih yang berhak memilih, tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebesar 0,3 %, dalam gelaran pemilihan serentak 2015, ternyata di Jawa Timur penyelenggara pemilihan belum dapat mencapai target. Secara keseluruhan rata-rata pemilih tersebut di Jawa Timur hanya mencapai 0,37 %, sehingga capaian kinerja yang dicapai sebesar 123,3 %.

Untuk indikator kinerja ini capaian tertinggi KPU Kab. Jember sebesar 0,77 %, selanjutnya Kota Surabaya sebesar 0,68 %, Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,64 % dan Kab. Situbondo sebesar 0,61 %. Sedangkan capaian terendah di KPU Kab, Tuban sebesar 0,05 %. Secara rinci dapat dilihat pada grafik **Pemilih yang berhak memilih, tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih** di atas.

TABEL
PERSENTASE HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2015
MENURUT KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA

No	Kab/Kota	% Partisipasi Pemilih	% Partisipasi Pemilih Perempuan	% Pemilih DISABILITAS	% Pemilih yang berhak memilih, tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih
1	PACITAN	59.83	52.62	10.30	0.48
2	KEDIRI	60.04	55.19	43.35	0.10
3	MALANG	58.36	52.58	36.05	0.44
4	SIDOARJO	55.69	53.93	79.45	0.64
5	TUBAN	52.03	58.15	27.84	0.05
6	MOJOKERTO	69.11	53.44	36.94	0.10
7	BLITAR KOTA	70.81	53.64	50.43	0.28
8	BLITAR	56.38	53.26	17.60	0.13
9	PONOROGO	73.88	50.93	49.86	0.46
10	BANYUWANGI	59.21	53.52	32.57	0.41
11	LAMONGAN	60.27	55.29	42.25	0.19
12	NGAWI	74.38	53.26	45.57	0.11
13	PASURUAN KOTA	59.83	52.62	10.30	0.48
14	TRENGGALEK	67.71	52.76	43.37	0.26
15	SUMENEP	66.36	55.35	9.95	0.32
16	SITUBONDO	74.43	53.63	25.89	0.61
17	GRESIK	70.13	52.93	63.95	0.54
18	JEMBER	52.14	55.06	7.98	0.77
19	SURABAYA	51.34	53.97	38.86	0.68
Jumlah		1,191.92	1,022.11	672.53	7.06
Rata-Rata		62.73	53.80	35.40	0.37

Sumber : Data DB-1 Kab/Kota, diolah

Tabel di atas, menggambarkan hasil realita dari gelaran pemilihan serentak di masing-masing Kabupaten/Kota penyelenggara terhadap indicator yang ditetapkan KPU RI dalam Rencana Strategis 2015 – 2019.

Secara garis besar rata-rata dari realisasi dan capaian kinerja dari penyelenggaraan pemilihan serentak di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel, di bawah ini. Sedangkan untuk pencapaian indicator kelima, rata-rata penyelenggara pemilihan serentak dapat memenuhi target 100 % dalam pendistribusian logistic paling lambat sehari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitasnya.

TABEL
RATA-RATA TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELANGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2015
DI PROVINSI JAWA TIMUR

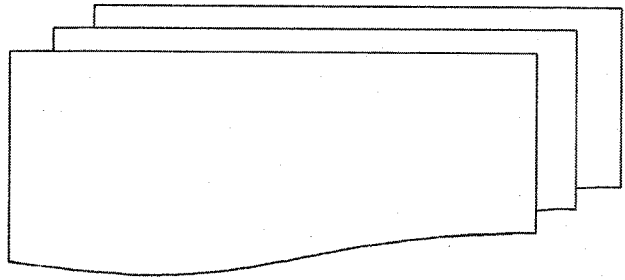
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(05)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;	77.5	62,73	80,94
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;	75	53.80	71,73
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	75	35.40	47,2
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	0.3	0.37	123,3
5	KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.	100	100	100

Sumber : Data KPU Provinsi dan Kab/Kota, diolah

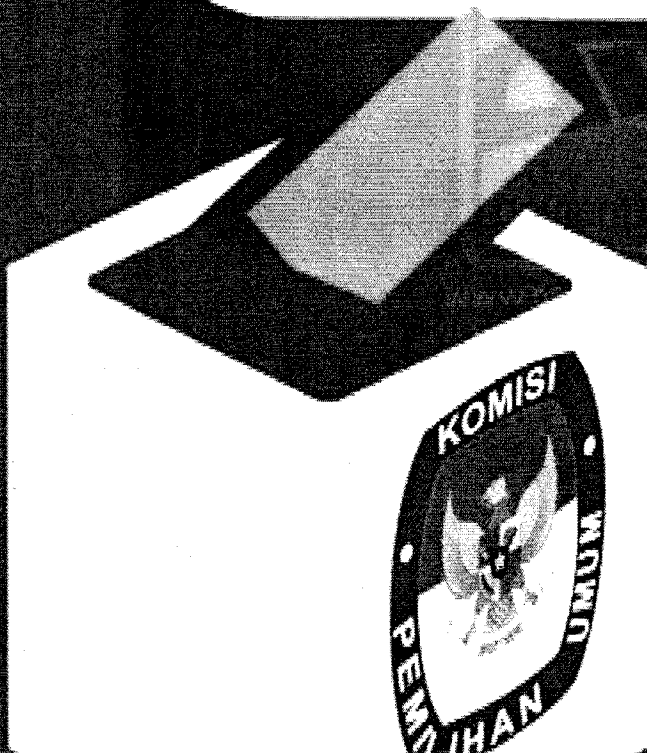
Ketiga, mulai tahun 2015, ada beberapa kegiatan yang berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan KPU, diantaranya : pemberian tunjangan kinerja untuk seluruh aparatur, pengisian data elektronika kepegawaian melalui e-PUPNS yang bertujuan untuk melakukan pendataan kembali terhadap keberadaan ASN/PNS di Indonesia, pemberangkatan pegawai struktural untuk mengikuti pendidikan dan latihan pimpinan tingkat IV (DIKLATPIM IV), mengirimkan CPNS untuk mengikuti pendidikan Pra Jabatan, pelatihan pembinaan kearsipan dan pembentukan PPID, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak.



DAFTAR ISI



satu
suara
untuk bangsa



Sebagai insan muda penerus bangsa,
kita juga punya hak untuk bersuara.
Ayo, gunakan satu suara kita sebaik
mungkin untuk Indonesia tercinta.

Dicetak
Februari 2016

KPU PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Tenggilis No. 1 – 3 Surabaya
Telp. 031 – 8484825,27,28
Fax. 031 – 8484826

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar isi	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Grafik	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Jawa Timur	3
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	37
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37
C. Akuntabilitas Keuangan	95
BAB IV PENUTUP	100
Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Lampiran 2	Pengukuran Kinerja KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Lampiran 4	Pengadaan Barang Jasa Tahun 2015 di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur
Lampiran 5	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Timur	11
Tabel 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur (keadaan per 31 Desember 2015)	14
Tabel 2.1	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	21
Tabel 2.2	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	27
Tabel 2.3	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	28
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap IKU tahun 2015	38
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU tahun 2015 – 2019 (sasaran strategis 1)	39
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU tahun 2015 – 2019 (sasaran strategis 2)	40
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU tahun 2015 – 2019 (sasaran strategis 3)	40
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Transparansi dan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	43
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Prasarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.	46
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	48
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	49

Tabel 3.9	Daftar Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Setjen KPU Di Lingkungan KPU Se-Jawa Timur Yang Memperoleh Kenaikan Pangkat Periode TMT 1 Oktober 2015	50
Tabel 3.10	SK Kenaikan Pangkat PNS Sekretariat Jenderal KPU TMT 01 April 2015	52
Tabel 3.11	Daftar PNS Organik di Lingkungan KPU Se-Jawa Timur Yang Memperoleh Kenaikan Pangkat Periode TMT 1 Oktober 2015	56
Tabel 3.12	Daftar PNS Di Lingkungan KPU Se-Jawa Timur Yang Menerima Pembinaan Disiplin Pegawai Tahun 2015	57
Tabel 3.13	Daftar PNS yang Diusulkan Kenaikan Gaji Berkala Di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	59
Tabel 3.14	Daftar Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	60
Tabel 3.15	Daftar Pegawai Daerah (Dpk) yang Mengikuti Alih Status Menjadi Pegawai KPU di Lingkungan KPU Se Jawa Timur Tahun 2015	63
Tabel 3.16	Daftar Mutasi PNS di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	68
Tabel 3.17	Daftar Perceraian PNS di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	69
Tabel 3.18	Daftar Pegawai yang belum Mengikuti Diklat PIM Tk.II/III/IV di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	73
Tabel 3.19	Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat Keprotokolan di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	75
Tabel 3.20	Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat Manajemen Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	77
Tabel 3.21	Daftar Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi SDN (outbond) di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	79

Tabel 3.22	Nama Tambahan Formasi CPNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur	81
Tabel 3.23	Jumlah Pejabat dan Sekretariat Tahun 2015 KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur	83
Tabel 3.24	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari Untuk KPU Seluruh Indonesia	84
Tabel 3.25	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel	88
Tabel 3.26	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhan	89
Tabel 3.27	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	91
Tabel 3.28	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	96

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Provinsi Jawa Timur Menurut Pendidikan dan kepangkatan/ Golongan	13
------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

satu
suara
untuk bangsa



Sebagai insan muda penerus bangsa,
kita juga punya hak untuk bersuara.
Ayo, gunakan satu suara kita sebaik
mungkin untuk Indonesia tercinta.

Disusunkan
Februari 2016

KPU PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Tenggilis No. 1 – 3 Surabaya
Telp. 031 – 8484825,27,28
Fax. 031 – 8484826

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu ”dikatakan bahwa *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi

Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis* oleh karena itu, KPU Provinsi Jawa Timur berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2015, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

A.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Timur selama tahun anggaran 2015.

Tujuan dari penyusunan LAKIP KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun 2016, sehingga diharapkan program/kerja tahun 2016 lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

A.2. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Tahun 2015 KPU Provinsi Jawa Timur mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

-
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja ;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019;
 - i. Surat Edaran Sekjen KPU RI Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;

-
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
 - j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - l. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

-
- penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

-
- h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - i. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, DAN KPSS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU ;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU KABUPATEN/KOTA dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

-
- data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
 - l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

-
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban-kewajiban KPU Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
 - j. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
 - k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu tugas pelaksanaan KPU Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi Jawa Timur; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

-
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi Jawa Timur.

C. Struktur Organisasi

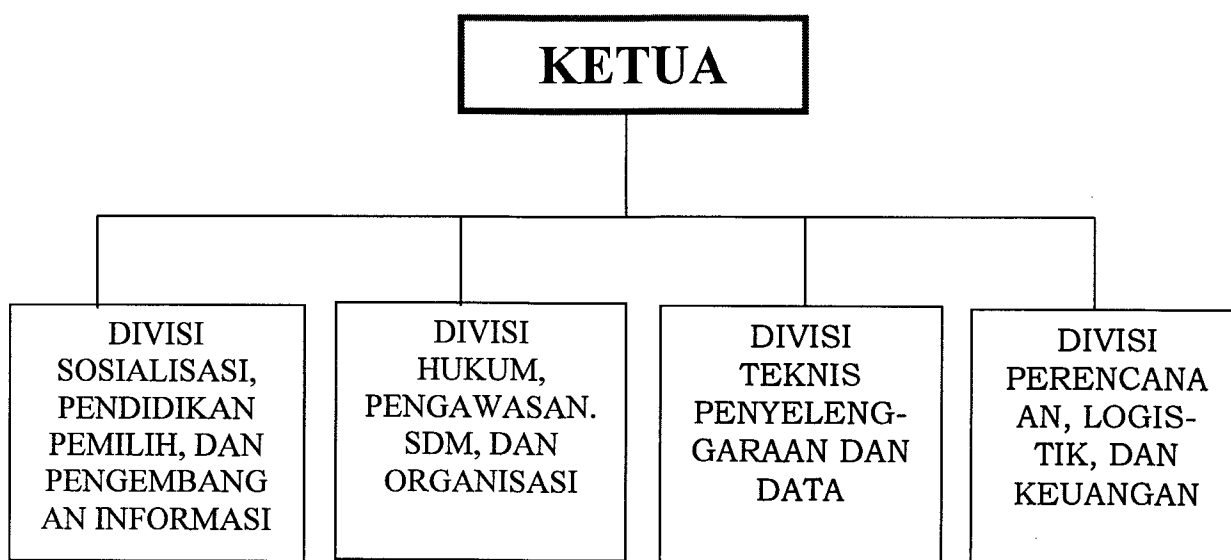
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi dilakukan pembagian tugas serta untuk mempermudah koordinasi di 38 Satker Provinsi Jawa Timur yang tersebar 38 wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka diantara para anggota di bentuk divisi dan koordinator wilayah. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 Februari 2014, Nomor : 09/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, maka struktur operasional Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari:

- a) Ketua KPU Provinsi Jawa Timur : Eko Sasmito, SH, MH;
- b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi dengan penanggung jawab divisi (koordinator) : Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos;
- c) Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi dengan penanggung jawab divisi (koordinator) : Muhammad Arbayanto, SH, MH;
- d) Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data dengan penanggung jawab divisi (koordinator) : Choirul Anam, S.Pd;

-
- e) Divisi Perencanaan, Logistik, dan Keuangan dengan penanggung jawab divisi (koordinator) : Dewita Hayu Shinta, SP, M.Si.

Adapun bagan organisasi KPU Provinsi Jawa Timur yang dibagi dalam 4 (empat) divisi dimaksud dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1.1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Timur



Dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat. Berdasarkan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan menurut pasal 168, Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas 3 bagian yaitu Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, dan Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas.

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf. Sub Bagian yang dimaksud adalah Subbag Program dan Data, Subbag Organisasi dan SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Logistik, Subbag Hukum, dan Subbag Teknis dan Hupmas.

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah 45 orang yang terdiri dari 34 orang PNS Organik, 11 orang PNS Dpk, 19 orang tenaga kontrak, lihat grafik 1.1. : Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Provinsi Jawa Timur Menurut Pendidikan dan Kepangkatan/Golongan di bawah

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 75,55 % formasi kepegawaian telah diisi pegawai organik, tetapi masih dalam level staf, karena kepangkatan dan golongan belum mumpuni untuk menduduki jabatan eselon/struktural, dimana rata-rata staf diangkat sebagai pegawai negeri sipil mulai tahun 2008. Sehingga untuk memenuhi kepegawaian di KPU Provinsi Jawa Timur, khususnya pejabat struktural (golongan dan kepangkatan) masih bergantung pada kepegawaian Pemerintah Daerah yang dipekerjakan (dpk).

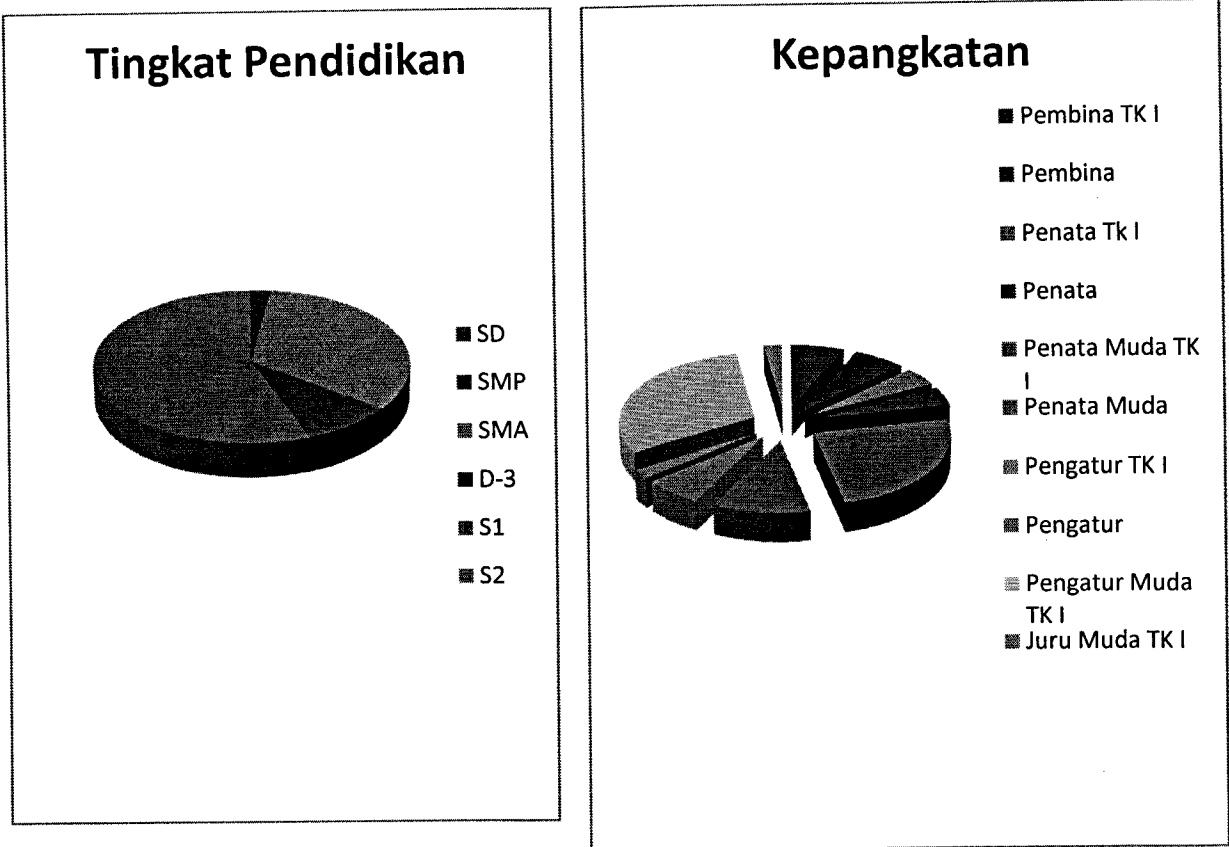
Menurut tingkat pendidikan, Sumberdaya Manusia di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur, terinci : SD Sederajat 0 orang, SMP sebanyak 1 orang, SMA Sederajat berjumlah 15 orang, berpendidikan D-3 sebanyak 4 orang, S-1 berjumlah 21 orang dan S-2 berjumlah 4 orang.

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa kepegawaian KPU Provinsi Jawa Timur didominasi staf dengan pendidikan Sarjana sebesar 46,6 %, sedangkan staf yang berpendidikan SMA sederajat sebesar 33,3 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pengembangan dan peningkatan, serta pembinaan karier dan pelaksanaan tugas akan lebih mudah dan cepat.

Sedangkan menurut tingkat kepangkatan/golongan, diperoleh data sebagai berikut : Pembina Tingkat I dan Pembina masing-masing 3 orang, Penata Tingkat I dan Penata masing-masing sebanyak 2 orang, Penata Muda Tingkat I berjumlah 11 orang, Penata Muda sebanyak 5 orang, Pengatur Tingkat I berjumlah 3 orang, Pengatur hanya seorang, Pengatur Muda Tingkat I sebanyak 14 orang dan Juru Muda Tingkat I hanya seorang.

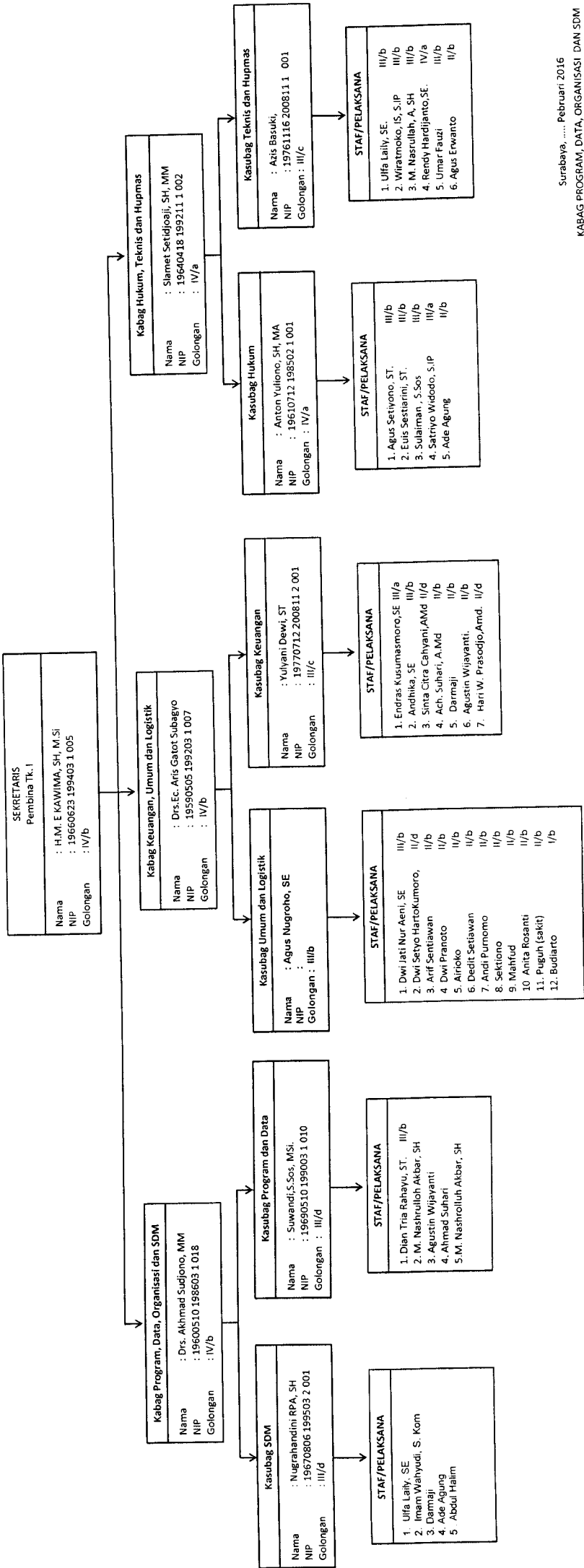
Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa staf di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur rata-rata berada di kepangkatan dan golongan peñata (III) sebesar 51,1 %. Ini menggambarkan bahwa pimpinan akan lebih mudah dalam menerapkan dan menjalankan manajemen birokrasi dan komunikasi di lingkungan kerja untuk mencapai hasil kinerja yang sangat maksimal dan optimal. Selaian itu, semakin banyak staf yang memilik kepangkatan dan golongan tinggi dengan didukung pendidikan yang tinggi, dapat dipastikan bahwa staf akan lebih cepat dalam merespons setiap kebijakan dan perintah yang diberikan pimpinan.

Grafik 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Provinsi Jawa Timur
Menurut Pendidikan dan Kepangkatan/Golongan



Adapun bagan organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.2. di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KEADAAN : JANUARI 2016



Surabaya, Februari 2016
KABAG PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM

Drs. AKHMAD SUDJONO, M. Si
NIP. 19600510 198603 1 018

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Provinsi Jawa Timur serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2015 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.



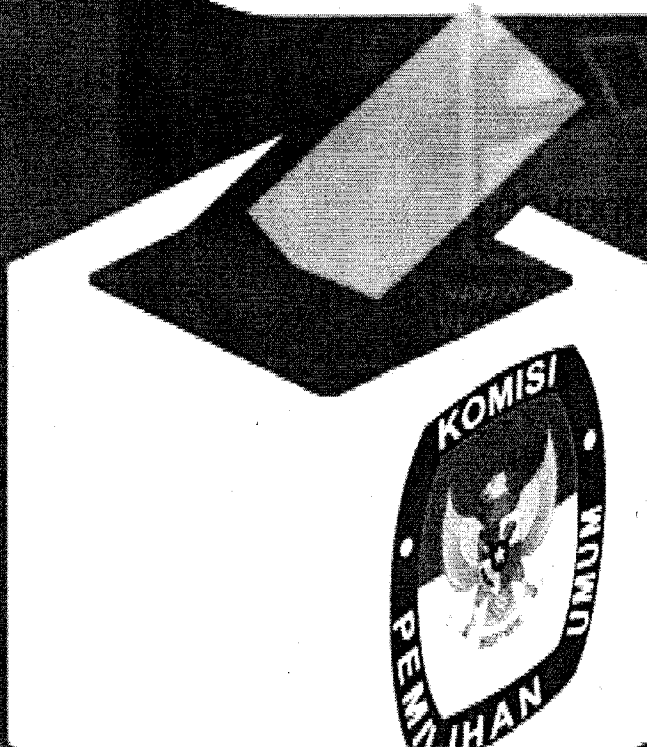
BAB II

PERENCANAAN

DAN PERJANJIAN

KINERJA

satu
suara
untuk bangsa



Sebagai insan muda penerus bangsa,
kita juga punya hak untuk bersuara.
Ayo, gunakan satu suara kita sebaik
mungkin untuk Indonesia tercinta.

Disusun
Februari 2016

KPU PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Tenggilis No. 1 – 3 Surabaya
Telp. 031 – 8484825,27,28
Fax. 031 – 8484826

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Organisasi

Sebagai lembaga vertical yang menganut system hirarkhies, visi dan misi KPU Provinsi Jawa Timur sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun visinya adalah **“terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

2. Misi Organisasi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2015 - 2019 sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam jangka waktu sampai tahun 2015, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Dalam Renstra KPU tahun 2015 – 2019, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama KPU yaitu :

- 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilukada ;
- 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pilukada ;
- 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 6) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
- 7) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
- 8) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu dan Pilukada ;

-
- 9) Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan ;
 - 10) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu dan Pemilukada ;
 - 11) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 12) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 13) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se Indonesia.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							
1	Terlaksananya fasilitasi Pembentukan lembaga riset kepiluan dan operasionalisasi-nya	Presentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepiluan dan operasionalisa sinya	75	75	75	75	75
2	Terlaksannanya pemutakhiran data pilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dicapil Provinsi, Kabupaten dan Kota	persentase Pemutakhiran Data Pilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dicapil di Provinsi, Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100
3	Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi di lingkungan Setjen KPU.	Persentase pembinaan SDM, pelayan an dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.	60	60	60	60	60
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU							
1	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	Persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag berfungsi dengan baik.	75	75	75	75	75

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK							
1	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi;	100	100	100	100	100
		Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP;	100	100	100	100	100
2	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu	Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.	100	100	100	100	100

Dalam kurun waktu 2015 – 2019, Komisi Pemilihan Umum akan melaksanakan 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 9 (Sembilan) kegiatan, yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Duapil Provinsi, Kabupaten dan

Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistic Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistic Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistic pemilu
		Tersedianya data kebutuhan logistik	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset pemilu dan operasionalisasinya
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilu: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilu
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
		Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi

		Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	
		Tersedianya Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasi an BMN KPU dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU

		dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
			Persentase penyelesaian

		hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota perlu dilakukan penataan prasarana dan sarana kerja. Namun demikian dalam upaya memenuhi kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Satuan Kerja KPU tersebut. Karena pada umumnya sebagian besar sarana prasarana yang ditempati sebagai kantor KPU Provinsi/Kabupaten/kota saat ini adalah asset milik pemerintah daerah setempat. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sangat tidak maksimal dan optimal.

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya tanah untuk pembangun an gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU
			Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah
			Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hokum, advokasi hokum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan

penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada table 2.3. berikut.

Tabel 2.3

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan

		penyelenggaraan Pemilihan Umum	penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada
			Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/Pemekaran
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilu

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tahun 2015, merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya KPU. Perencanaan kinerja berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tetapi dalam perjalanannya berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, sehingga beberapa bentuk penyebutan dan implementasinya akan mengalami perubahan yang signifikan.

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) akan berubah menjadi Perjanjian Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekrteriat KPU.

Selama ini Penetapan Kinerja difokuskan menjadi tugas Sekretariat KPU saja, namun mulai tahun 2015, secara khusus KPU (disebut Komisioner) juga harus menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja

yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga. Dalam dokumen renstra, sasaran strategis KPU terdiri dari : 3 (tiga) dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama, sebagaimana berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

Sasaran strategis ini telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu dan Pemilukada yang demokratis.

Keberhasilan dari penyelenggaraan pemilihan secara umum di Indonesia akan tergambar dari tercapainya target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Keberhasilan akan ditentukan banyak factor baik secara internal maupun eksternal. Dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu factor utama dari pencapaian sasaran strategis ini.

Belajar dari pengalaman selama ini, keberhasilan penyelenggara belum mampu untuk melampaui target kinerja yang ditentukan KPU melalui rencana kinerjanya. Ini merupakan tantangan yang terberat dalam penyelenggaraan pemilihan bagi KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sasaran strategis akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, dengan terinci dalam 5 (lima) indikator kinerja utama, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;	77.5
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;	75
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	75
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	0.3
5	KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.	100

2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada.

Sasaran strategis ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilukada. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan, dengan berpedoman pada 6 (enam) indikator kinerja utama, yang meliputi :

No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;	60
2.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100
3.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu dan Pemilukada;	3
4.	Opini BPK atas LHP;	WTP
5.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu dan Pemilukada;	-
6.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.	100

3) Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Sasaran strategis dari kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi kepemiluan. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan, dengan mengacu kepada 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	90
2.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.	86

Sedangkan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur, Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Transparansi dan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.

Sasaran ini telah ditetapkan dalam Renstra KPU tahun 2010 – 2014 dan transisi 2015 – 2019. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan akuntabilitas

pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU. Sasaran ini dicapai melalui beberapa program dan kegiatan, meliputi :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 Laporan 100 %
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	1 Laporan 100%
Laporan pengelolaan hibah pemilihan	2 laporan
Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	12 Layanan Bulan 100%

2. Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Prasarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhi logistic keperluan pemilu dan pemilukada.

Sasaran ini dicapai melalui beberapa program dan kegiatan, meliputi :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.	1 Dokumen 77.5%

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.

Sasaran ini akan dicapai melalui beberapa program dan kegiatan, meliputi :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 Dokumen 77.5%
Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Timur	1 Dokumen
Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan 77.5%

4. Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur.

Sasaran ini maksud untuk menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur. Sasaran ini akan dicapai melalui beberapa program dan kegiatan, meliputi :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.	5 Laporan 90%
Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.	100 orang 100%
Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU	1 Orang 90 %
Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Daerah Pemekaran	5 Orang 90%
Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan	1 Dokumen 90%

5. Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari Untuk KPU Seluruh Indonesia.

Sasaran ini dimaksudkan untuk terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di lingkungan KPU Seluruh Indonesia.

Sasaran ini akan dicapai dengan program dan kegiatan yang meliputi :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.	3 Dokumen 90 %
Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	3 Laporan 100%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Trampil dalam rangka Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	2 Orang 100 %
Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	1 Laporan 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	12 Layanan Bulan 100%

6. Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel.

Sasaran ini dimaksudkan untuk terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel di lingkungan KPU. Sasaran ini akan dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1 Laporan 100%

7. Terselenggaraanya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan persiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhan. Sasaran ini akan dicapai melalui program dan kegiatan yang meliputi :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	5 Kasus 90%
Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan 85%
Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1 Provinsi 90%

8. Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Sasaran ini akan dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat	50 Orang 100 %
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	1 Satker 100%
Jumlah pusat pendidikan pemilih	1 Satker 100%
% Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan 75%
Jumlah kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan

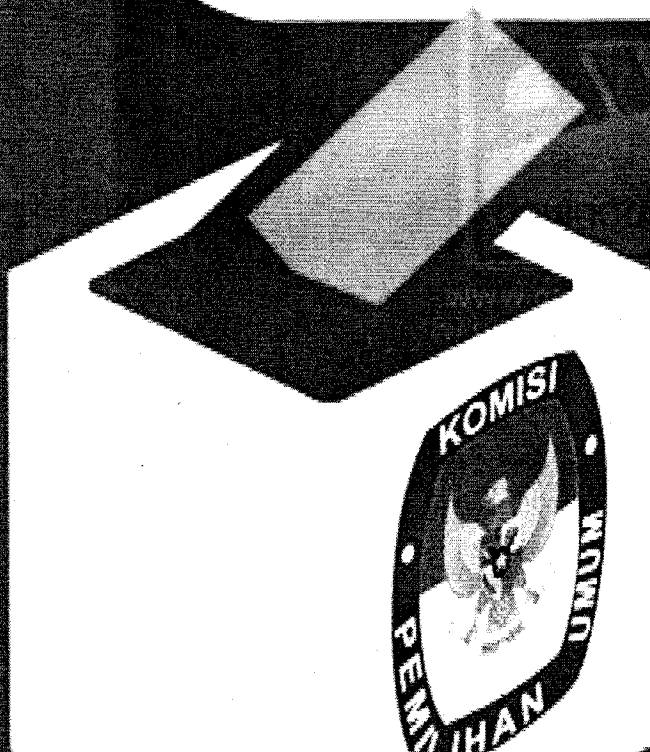


BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

satu
suara
untuk bangsa



Sebagai insan muda penerus bangsa,
kita juga punya hak untuk bersuara.
Ayo, gunakan satu suara kita sebaik
mungkin untuk Indonesia tercinta.

Disusuna
Februari 2016

KPU PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Tenggilis No. 1 – 3 Surabaya
Telp. 031 – 8484825,27,28
Fax. 031 – 8484826

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhies, kinerja KPU Provinsi Jawa Timur merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Pusat. Kinerja KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2014 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Dalam tahun anggaran 2015, KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU pada tahun 2014 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

B. Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja

Tahun 2015, merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dalam penyusunan evaluasi kinerja akhir Instansi Pemerintah, karena merupakan tahun transisi/perubahan dari penggunaan Rensta 2010 – 2014 menuju ke Renstra tahun 2015 – 2019. Karena dalam penetapan kinerja untuk tahun 2015 harus menggunakan ketentuan yang ada di Renstra KPU tahun 2010 – 2014. Perencanaan kinerja ini berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tetapi dalam perjalanannya berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB

Nomor 53 Tahun 2014, sehingga beberapa bentuk penyebutan dan implementasinya akan mengalami perubahan yang signifikan.

KPU menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan KPU untuk tahun 2015, mengacu pada Renstra tahun 2010 – 2015 melalui target-target dalam perjanjian kinerja. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya selama tahun 2015, sehingga menghasilkan capaian kinerja tahun 2015, lihat tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap IKU tahun 2015.

No.	Indikator Kinerja	Target %
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;	75
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;	70
3	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	2
4	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	85
5	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) akan berubah menjadi Perjanjian Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekretariat KPU.

Selama ini Penetapan Kinerja difokuskan menjadi tugas Sekretariat KPU saja, namun mulai tahun 2015, secara khusus KPU (disebut Komisioner) juga harus menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga. Dalam dokumen renstra, sasaran strategis KPU terdiri dari : 3 (tiga) dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama, sebagaimana berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

Sasaran ini telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu dan Pemilukada yang demokratis. Sasaran strategis akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, dengan terinci dalam 5 (lima) indikator kinerja utama, lihat tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2

**Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU
Tahun 2015 – 2019 (sasaran strategis 1)**

No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;	77.5
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;	75
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	75
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	0.3
5	KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.	100

2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada.

Sasaran strategis ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilukada. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan, dengan berpedoman pada 6 (enam) indikator kinerja utama, dilihat tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU
Tahun 2015 – 2019 (sasaran strategis 2)

No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;	60
2.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100
3.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu dan Pemilukada;	3
4.	Opini BPK atas LHP;	WTP
5.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu dan Pemilukada;	-
6.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.	100

3) Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Sasaran strategis dari kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi pemilihan. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan, dengan mengacu kepada 2 (dua) indikator kinerja utama, lihat tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU
Tahun 2015 – 2019 (sasaran strategis 3)

No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	90
2.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.	86

Sedangkan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur, Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja, sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU. Setiap tahunnya, di lingkungan Satuan Kerja KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) Rencana Kinerja Tahunan yang diperuntukkan bagi Komisioner dan Sekrteriat KPU.

1. Rencana Kinerja KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015 (Komisioner).

a. Berdasarkan Renstra tahun 2010 – 2014.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target %	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(04)	(05)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;	75	62,73	83,64
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;	70	53,80	76,85
3	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	2	0,37	18,5
4	Persentase kasus gugatan hokum dan sengketa hokum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	85	75	88,23
5	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	

b. Berdasarkan renstra tahun 2015 - 2019

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(05)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77.5	62,73	80,94
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;	75	53.80	71,73
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	75	35.40	47,2
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	0.3	0.37	123,3
5	KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan	100	100	100

	suara tepat jumlah dan kualitas.			
6.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;	60	57,6	96
7.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100	100	100
8.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu dan Pemilukada;	3	0	0
9.	Opini BPK atas LHP;	WTP	WDP	
10.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu dan Pemilukada;	-	-	
11.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.	100	100	100
12.	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	90	90	100
13.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.	86	54	62,79

2. Rencana Kinerja KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015 (Sekretariat) :

Sebagaimana sudah ditetapkan dalam penetapan kinerja (TAPKIN) tahun 2015 atau disebut dengan Perjanjian Kinerja (PK) (Perpres 29 tahun 2014 dan Kepmenpan RB No. 53 tahun 2014), maka selanjutnya akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis capaian dari masing-masing sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015, sebagai berikut :

Sasaran 1	:	Transparansi dan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
------------------	----------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU. Sasaran ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan, lihat tabel 3.5, diantaranya :

Indikator kinerja Laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dicapai melalui output kegiatan pembuatan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan KPU Provinsi Jawa Timur secara rutin setiap bulannya dengan menghasilkan 1 (satu) bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam tahun 2015, KPU Provinsi Jawa Timur telah memanfaatkan system akuntansi dan pelaporan keuangan, hal ini melihat realisasi output kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu berupa 1 (satu) laporan pertanggungjawaban keuangan. Selama setahun, output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 92,992,000 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 85,148,970 atau sekitar 91.57 %.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Transparansi dan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 Laporan 100 %	1 laporan	100
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	1 Laporan 100%	1 laporan	100
Laporan pengelolaan hibah pemilihan	2 laporan	3 laporan	180
Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	12 Layanan Bulan 100%	12 layanan bulan	100

Capaian Indikator Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid, dicapai melalui output kegiatan pembuatan, penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid dengan target 1 laporan – 100 %. Capaian kinerja output

kegiatan ini telah direalisasikan dengan kegiatan rutin bulanan bendahara pengeluaran (subag keuangan) dalam pembuatan, penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan berupa 1 (satu) laporan. Untuk mendukung output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47,704,000, dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 43,961,300 atau mencapai 92.15 %

Untuk tingkat capaian indikator kinerja laporan pengelolaan hibah pemilihan dengan target 2 laporan, akan dicapai melalui output kegiatan pengawalan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pembinaan pengelolaan dan pelaporan NPHD Pilkada Serentak tahun 2015/Implementasi Aplikasi SIKUBAH. Output kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 379,466,000 dan terserap sebesar Rp. 308,637,000 atau sekitar 81.33 %, dengan capaian kinerja kegiatan sebanyak 3 (tiga) laporan kegiatan, dengan bobot 180 %.

Realisasi Output kegiatan ini antara lain :

- a) Rapat pembinaan pengelolaan pelaporan dana hibah untuk Pilkada Serentak Tahun Anggaran 2015/Implementasi Aplikasi SIKUBAH dan Evaluasi Agenda Kerja Tahun Anggaran 2015 (SPK No. 07/SPK-PBJ/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015) ;
- b) Rapat pembinaan pengelolaan pelaporan dana hibah untuk Pilkada Serentak Tahun Anggaran 2015/Implementasi Aplikasi SIKUBAH dan Pengelolaan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2015 (SPK No. 10/SPK-PBJ/XI/2015, tanggal 3 November 2015) ;
- c) Rapat koordinasi pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran dana hibah untuk Pilkada Kab/Kota di Jawa Timur (SPK No. 15/SPK-PBJ/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015) ;

Target sebanyak 12 Layanan Bulan, dengan bobot 100 % dalam capaian indikator kinerja ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25,348,804,000, dalam realisasinya dapat terserap sebesar Rp. 24,874,576,745 atau sekitar 98.13 %, ini merupakan output kegiatan rutin yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Timur untuk pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, honorarium, uang kehormatan, uang tunjangan

kinerja pegawai setiap bulannya (12 bulan layanan per tahun). Besaran anggaran mencapai 22,6 Milyar Rupiah, dikarenakan pembayaran tunjangan kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur dimasukan dalam DIPA KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015.

Pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat KPU berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU dan Surat Keputusan Sekjen KPU Nomor 241/Kpta/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Setjen KPU.

Sasaran 2	:	Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Prasarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.
------------------	----------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhi logistic keperluan pemilu dan pilkada, termasuk mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.

Sasaran ini dicapai melalui output kegiatan perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistic Pemilu dengan target 1 (satu) dokumen – dengan bobot 77,5 %. Alokasi anggaran untuk output kegiatan ini sebesar Rp. 107,987,000 dan dalam realisasinya terserap untuk belanja honorarium operator SIMAK BMN dan SIRUP, serta belanja perjalanan lainnya dan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Pemungutan, Penghitungan Suara dan Progress Report Distribusi Logistik Pilkada Serentak di Jawa Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 81,673,850 atau 75.63 %.

Sedangkan untuk capaian kinerja dari target yang ditetapkan, terealisasi 1 (satu) dokumen pelaporan perkembangan aplikasi SIMAK dan SIRUP, serta 1 (satu) laporan kegiatan rakor atau capaian kinerja sebesar 155 %, sebagaimana tabel 3.6., di bawah ini.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaraanya
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,
Inventarisasi Sarana dan Prasarana Serta Terpenuhinya Logistik
Keperluan Pemilu.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.	1 Dokumen 77.5%	2 Dokumen	155

Realisasi Output kegiatan ini antara lain :

- a) Rapat evaluasi pengelolaan logistic PEMILU tahun 2014 dan Koordinasi Pilkada Tahun 2015 di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur (SPK No. 06/SPK-PBJ/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015) ;
- b) Rapat koordinasi persiapan Akhir Pemungutan, Penghitungan Suara dan Progress Report Distribusi Logistik Pilkada Serentak di Jawa Timur tahun 2015 (SPK No. 12/SPK-PBJ/XII/2015, tertanggal 1 Desember 2015) ;

Sasaran 3	:	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.
------------------	----------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) output kegiatan diantaranya : pertama, penyediaan dokumen perencanaan dan data kepemiluan yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 160.662.000, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 116.815.040 atau 72,71 %.

Target 1 (satu) dokumen – 77,5 % melalui capaian kinerja penyediaan dokumen perencanaan dan data kepemiluan dengan

indicator kinerjanya kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL, ternyata KPU Provinsi Jawa Timur dapat merealisasikannya dengan tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan dan data dukungnya, yaitu Penetapan Kinerja tahun 2015 dan dokumen pagu indikatif untuk tahun 2016. Sehingga persentase yang dicapai adalah sebesar 155 %.

Realisasi output kegiatan ini yaitu Rapat kerja evaluasi kinerja dan penyerahan Pagu Indikatif Tahun 2016, serta Penyerahan Dan Validasi Daftar Absensi Tunjangan Kinerja (TUKIN) (SPK Nomor 11/SPK-PBJ/XII/2015, tertanggal 1 Desember 2015)

Kedua, Output kegiatan dokumen pmutakhiran data pemilih telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 158.972.000, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, anggaran terserap sebesar Rp. 120.912.150 atau sekitar 76,06 %

Capaian kinerja kedua dengan indicator frekuensi pmutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Timur yang ditargetkan 1 (satu) dokumen - 50 %, dapat direalisasikan capaiannya sebanyak 2 (dua) dokumen atau sekitar 100 %, yaitu dokumen laporan pmutakhiran data pemilih dan surat perjanjian kerja dalam pengadaan belanja modal untuk pengembangan dan penguatan serve pmutakhiran data pemilih (SPK Nomor 13/SPK-PBJ/XII/2015, tertanggal 2 Desember 2015).

Ketiga, output kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring dan supervise pelaksanaan kegiatan KPU, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 55.852.000 dan terserap sebesar Rp. 27.497.200 atau sekitar 49,23 %.

Selanjutnya, Output capaian kinerja dengan indicator laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu sebagaimana tabel 3 di bawah, yang ditargetkan 1 (satu) dokumen - 77,5 %. Selama tahun anggaran 2015 dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu : tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2014 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2015, sehingga capaian yang diperoleh sekitar 155 %.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data
dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 Dokumen 77.5%	2 Dokumen	155
Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Timur	1 Dokumen 50 %	2 dokumen	100
Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan 77.5%	2 dokumen	155

Sasaran 4	:	Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur
------------------	----------	---

Pola pembinaan dan pengembangan sumberdaya daya manusia dalam sebuah lembaga dapat dilakukan dengan : **Promosi** merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, serta **Demosi** yakni penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Demosi adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji.

Sasaran ini maksud untuk menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur. Sasaran kegiatan ini dicapai melalui output kegiatan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia ; layanan peningkatan kompetensi SDM ; layanan pengadaan pegawai baru ; penggantian antar waktu

anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ; dan dokumen kepegawaian, tabel 3.8. berikut ini :

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.	5 Laporan 90%	6 Laporan	108
Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.	100 orang 100%	150 orang	150
Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU	1 Orang 90 %	3 orang	270
Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Daerah Pemekaran	5 Orang 90%	0	0
Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan	1 Dokumen 90%	1 dokumen	90

Capaian kinerja output kegiatan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia ditargetkan 5 laporan – 90 %, terealisasi sebanyak 5 (lima) laporan dan 90 %. Output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 166.877.000 dan diserap sebesar Rp. 122.807.800 atau 73,59 %, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Tim yang bertugas memberikan

pertimbangan kepada pejabat yang berwenang, dalam pengangkatan, pemindahan perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

KPU Provinsi Jawa Timur selaku Baperjakat di lingkungan KPU se-Jawa Timur, telah melakukan proses administrasi secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa output kegiatan yang dilakukan antara lain :

a) Kenaikan Pangkat.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian, sedangkan kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara.

Dalam implementasinya ada dua jenis kenaikan pangkat, yaitu : **Kenaikan pangkat reguler** adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan, **dan kenaikan pangkat pilihan** adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasinya yang tinggi.

Berdasarkan sistem kenaikan pangkat dibedakan menjadi dua yaitu : Sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan. Disamping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas pegawai negeri sipil dapat diberikan : kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan meninggal/tewas dalam tugas dan kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Secara normatif kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU se Jawa Timur diproses sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Setahun, proses kenaikan pangkat dilakukan dalam 2 periode yaitu TMT 1 April 2015 dan TMT 1 Oktober 2015, termasuk pengangkatan CPNS menjadi PNS Setjen

KPU di Lingkungan KPU se Jawa Timur tahun 2015 sebanyak 25 (duapuluh lima) pegawai, sebagaimana data tabel 3.9. di bawah ini.

TABEL 3.9
Daftar Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Setjen KPU
Di Lingkungan KPU Se-Jawa Timur
Yang Memperoleh Kenaikan Pangkat
Periode TMT 1 Oktober 2015

No.	Nama Pegawai	NIP	Gol.	Intansi/Unit Kerja (KPU)
1	2	3	4	5
1	ARNIK APRIL SUSANTI	19790421 201407 2 003	III/a	Surabaya
2	PURWANTI CANDRA MULYANI, SE	19750907 201407 2 001	III/a	Lamongan
3	MOH. FATHONI	19681024 201407 1 002	III/a	Kab. Probolinggo
4	YUDA, S.T.	19720526 201407 1 001	III/a	Pamekasan
5	ANANG SUBEKTI, S.Pd	19751214 201407 1 002	III/a	Kab. Mojokerto
6	R. RONY WAHYUDI, A.Md	19790119 201407 1 001	II/c	Sampang
7	ANANG ASY'ARI	19750119 201407 1 001	II/a	Nganjuk
8	S. MAINATUN	19680707 201407 2 001	II/a	Sampang
9	SUWITO HADI	19680303 201407 1 001	II/a	Lamongan
10	IRWAN SETYADI	19840921 201407 1 002	II/a	Lamongan
11	AMI FITRIYAH	19830307 201407 2 002	II/a	Lamongan
12	AMAM FATHONI	19831103 201407 1 002	II/a	Kota Probolinggo
13	GIRI SAPTONO	19620125 201407 1 001	II/a	Jember
14	PURWANTO	19720825 201407 1 001	II/a	Jember
15	SUWANI	19680616 201407 1 001	II/a	Jember
16	DIDIK YULIANA	19820728 201407 1 001	II/a	Tulungagung
17	SUYANI	19770425 201407 1 001	II/a	Tulungagung
18	IDAYU WIDURI	19770313 201407 2 002	II/a	Surabaya
19	ENDAH PURWINDARI	19671015 201407 2 001	II/a	Surabaya
20	FARID HARDIANTO	19780731 201407 1 002	II/a	Surabaya
21	IDRIS ROCHMAD	19801231 201407 1 003	II/a	Surabaya
22	NUR ALIYAH	19820906 201407 2 001	II/a	Kab. Probolinggo
23	EKO ISWAHYUDI	19740930 201407 1 001	II/a	Batu
24	SUGIANTO	19800418 201407 1 002	II/a	Bangkalan
25	JUARI	19741001 201407 1 003	I/c	Banyuwangi

Untuk TMT 1 April 2015 yang diproses dan telah naik pangkat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Pegawai di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (1 Laporan), dengan rincian data pada tabel 3.10, sebagai berikut :

TABEL 3.10
SK KENAIKAN PANGKAT PNS SEKRETARIAT JENDERAL KPU
TMT. 01 APRIL 2015

JAWA TIMUR

NO.	NO URUT SK	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	N I P	PANGKAT/ GOL RUANG	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU
1	1	2	3	4	5
1	✓	KWARTIKA CANDRA DEWI., SE	197308142007012002	Penata III/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
2	✓	ANNA PRATAMA., S.Pd	198006212007012004	Penata III/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
3	✓	HENNY PURWANINGTYAS SAVITRI, SE, SE	197504132007012001	Penata III/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
4		MAKHSUN, S.Ag	197205302008111001	Penata III/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
5		FENI YUDI ARIYANTO., SE	197901072007011005	Penata III/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
6	✓	MOCHAMAD SUTAJI., SH	197605262007011003	Penata III/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
7	✓	NANANG SUBEKTI, S.IP	198202142009021005	Penata III/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
8	✓	TITIEN PRIHATINI, SH	198102202010122001	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
9	✓	CANDRA SETYA ARDANI, SAB	197807292010121002	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
10		DHINAR HASTITI, SH	198705072010122005	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
11	✓	DWI RATNA ANJAR SAKTI, SE	198710012010122003	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
12	✓	OCTIAN ANUGERAHA, SH	198610062010121005	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
13	✓	NANIK SULISTYORINI, SH	198507162010122002	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
14	✓	EMY SUPRIYATI, S.IP	198010102010122002	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
15	✓	ALIM SYAIFUL FUAD, SE	198707012010121002	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
16	✓	RATNA ROSANTI, S.IP	198008262010122002	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
17	✓	MAHYUNI, SH	198503142010121002	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
18	✓	UMI PADILAH, SE	198409202010122002	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
19	✓	FITRI MAHARANI YUDHITA, S.IP	197908202010122001	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
20	✓	MINATI MUKMININ, SE	198704062010122005	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
21	✓	HENRI WIJAYA, S.IP	198402172010121004	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
22	✓	GALIH TRIATMOJO, S.Kom	198603292010121005	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
23	✓	DINA TRIASMADJI, SH	198408012010122005	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
24	✓	HENDRIAN HASWARA BAYU, S.Sos	198105222010121003	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015

NO.	NO URUT SK	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	2 N I P	PANGKAT/ GOL RUANG	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU
1	1	2	3	4	5
25	✓	SANDRA AMELIA ATUNGAL, S.I.Kom.	198803272010122006	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
26		ADI TRI HARTANTO, S.Kom	198409042010121001	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
27	✓	ABIYDAH ILMAYANTI, S.IP	197808202010122004	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
28	✓	NUR HANSAH, S.Sos	197703142010122001	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
29		MOKHAMMAD SAMSUL ARIF, S.Sos	198208192010121004	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
30	✓	RAHANI ITSIA KURNIANINGRUM, S.Sos	198408212010122002	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
31	✓	NAFIUNA HIDAYATUS SA'IDAH, S.Kom	198709222010122004	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
32		DIAN CHOLIFAH SARI, SE	198208142010122003	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
33	✓	AGUSTIN NINGSIH, SE	198308312010122001	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
34	✓	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, S.A.B	198603262010122005	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
35	✓	BINTANG FAJAR ADI SATRIA, S.Kom	198801252010121006	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
36	✓	ANDIK INDARTO, SH	198607222010121005	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
37	✓	RISKANING DIANTI, S.Sos	198707232010122004	Penata Muda Tingkat I III/b	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
38		WARNO	197308182007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
39	✓	BIASIN	197106152007011005	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
40	✓	M. AGUS SHOLIKIN	197804072007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
41	✓	ROCHMAD	196910012007011009	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
42	✓	IWAN THEODORUS WANGKO	196103162007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
43	✓	IKA RAHMASARI	197810052007012002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
44	✓	EKO AGUS BUDI S	197508012007011004	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
45	✓	TONI CAHYO NUGROHO	198306112007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
46	✓	SUKANDAR	198001252007011004	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
47	✓	SUHARTONO	198204222007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
48	✓	SINGGIH CAHYONO	197507142007011007	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
49	✓	ISKANDAR	198303022007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
50		SUYANTO	198204142007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
51	✓	MOH.SYAIFUL RAMADHAN	197908072007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015

NO.	NO URUT SK	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	N I P	PANGKAT/ GOL RUANG	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU
1	1	2	3	4	5
52	✓	YUSI ARDIYANTO	197501232007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
53	✓	JERRY HANRY HUKOM	197601192007011005	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
54	✓	DIMAS MUHAMMAD FANANI	198402202007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
55	✓	ERMAWATI PUSPITA SARI	198210172007012001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
56	✓	YUDI SETIAWARMAN	196112252007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
57		NUR IMANAH	198204272007012002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
58	✓	ARDIAN YULIANTI	198407102007012001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
59	✓	TJETJEP SUDARYANTO	198202192007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
60	✓	RUDY HARMOKO	198308152007011003	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
61	✓	SOIRIN	197008032007011005	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
62	✓	ZAENAL AFANDHI	198209252007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
63	✓	JUSA IRIANSYAH	196112142007011005	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
64		MUJIBURRAHMAN	198411262007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
65	✓	SAMSUL ARIFIN	196907162007011005	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
66	✓	A'AN EKA HENDRIYANSYAH	198203082007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
67	✓	BAMBANG PUJIANTO	197304062007011006	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
68	✓	SALEH	197507012007011003	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
69	✓	MOHAMMAD ISRO	197906202007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
70	✓	SUWARTO	196802252007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
71		DODIK MUSTAHID ASTARI RUMANAMA	197603172007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
72		SULISTIANAH	197705112007012002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
73	✓	EKO WAHYUDI	197005222007011003	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
74	✓	KASMAN	197303222007011003	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
75	✓	HARI MULYONO	197612032007011004	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
76		DWI WIDOYOKO	197706182007011001	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
77	✓	AWAN AGIONO	196805012007011011	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
78	✓	RINANTI KURNIA SARI	196906222007012004	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015

NO.	NO URUT SK	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	N I P	PANGKAT/ GOL RUANG	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU
1	1	2	3	4	5
79	✓	HARYANTO	198210112007011002	Pengatur II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
80	✓	EFI ANITA OKTAFIA, A.Md	198610112010122007	Pengatur Tingkat I II/d	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
81	✓	DIYAH AYU SUNDARI, A.Md	198808142010122006	Pengatur Tingkat I II/d	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
82	✓	FERAWATI, A.Md	198807032010122003	Pengatur Tingkat I II/d	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
83	✓	WIJI RAHAYU, A.Md	198307052010122002	Pengatur Tingkat I II/d	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
84		HASRIANI, A.Md	198504032010122005	Pengatur Tingkat I II/d	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
85	✓	SUPRIYANTO	196308082007011003	Juru II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
86	✓	SURYONO	197509272007011007	Juru II/c	313Kpts/Setjen/TAHUN 2015
87	370 ✓	PITRIONO	197610072007011003	Pengatur Muda II/a	374Kpts/Setjen/TAHUN 2015
88	1 ✓	PRATITIS ANDY NUGROHO, SE	197506082008111001	Penata III/c	384Kpts/Setjen/TAHUN 2015
89	3 ✓	IDA NUR FARIDA, S.Sos	197801292007102001	Penata III/c	384Kpts/Setjen/TAHUN 2015
90	15 ✓	MARIA RATRI NINGTYAS, S.IP	197912182010122002	Penata Muda Tingkat I III/b	384Kpts/Setjen/TAHUN 2015
91	51 ✓	FAJAR BAYU WICAKSONO, S.E.	198605302009121004	Penata Muda III/a	384Kpts/Setjen/TAHUN 2015
92	3 ✓	SULISTİYANA RIASITAWATI., SE	197706122007012002	Penata III/c	411Kpts/Setjen/TAHUN 2015
93	✓	Irwani Susanto A.Md.			

DITERIMA OLEH :

Untuk TMT 1 Oktober 2015 yang diproses dan telah naik pangkat sebanyak 10 (sepuluh) Pegawai di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (1 Laporan), dengan rincian data pada tabel 3.11, sebagai berikut :

TABEL 3.11
DAFTAR PNS ORGANIK
DI LINGKUNGAN KPU SE-JAWA TIMUR
YANG MEMPEROLEH KENAIKAN PANGKAT
PERIODE TMT 1 OKTOBER 2015

No.	Nama Pegawai	NIP	Instansi/Unit Kerja (KPU)	Ket. Kenaikan Pangkat	
				Semula	Menjadi
1	2		3	4	5
1	HENNY NURDIANY, SE		Kota Kediri		
2	ARI NUGROHO JATMIKO		Kab. Malang		
3	BARDA SURAIDAH, SE		Kab. Pasuruan		
4	ACHMAD EKO BUDIANTO, S.Kom		Sidoarjo		
5	ANDI TRI PRABONO, SH		Banyuwangi		
6	OKTAFRIDA INSANI, S.Sos		Kota Kediri		
7	EKO NOERDIANTO, SE		Banyuwangi		
8	ROCHMAN, ST		Banyuwangi		
9	SURYO AGUNG NUGROHO, S.Kom		Sidoarjo		
10	BUDIONO, SH		Lumajang		

b) Disiplin pegawai.

Selama tahun 2015, KPU Provinsi Jawa Timur selaku BAPERJAKAT telah melakukan tugasnya untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia di lingkungan KPU se Jawa Timur, diantaranya pembinaan disiplin pegawai, mulai dari hukuman disiplin tingkat ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis), hukuman disiplin tingkat sedang (penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun), dan hukuman disiplin tingkat berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,

pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat).

TABEL 3.12
DAFTAR PNS DI LINGKUNGAN KPU SE-JAWA TIMUR
YANG MENERIMA PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI TAHUN 2015

No.	Nama Pegawai	NIP	Gol	Satker/ Instansi	Surat Dinas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
1	ANDRY PUGUH HERDIANTO, SE	19730831 200701 1 001	III/b	Kab. Malang		Berat : Penurunan pangkat dari III b ke III/a selama 1 tahun
2	SOFWAN			Kab.. Madiun		Berat : Penurunan pangkat dari II/b ke II/a selama 1 tahun
3	EBNU WASTU PRAMUKA			Kab. Mojokerto		Berat : Penurunan pangkat dari II/b ke II/a selama 1 tahun
4	ADI SETIAWAN, S.Kom			Kab. Pasuruan		Berat : Diusulkan Pemberhen- tian
5	DODIK MUSTAHID A.	19760317 200701 1 001	II/b	Kota Madiun	41.800/Kpts/ Ses-Kota- 014.329982/V I/2015, tgl.24 Juni 2014 95/KPTS/ Ses-Prov. 014/ VIII/ 2015, tgl. 21/8/2015	Ringan : Teguran Tertulis
6	SON BASKORO, SH	19821010 201001 1 024	III/b	Kab. Gresik	94/KPTS/ Ses-Prov. 014/ VIII/ 2015, tgl. 21/8/2015	Ringan : Teguran Lisan
7	ANGGIE ANGELIA PERMATA, SE, MM	19870602 201012 2 004	III/b	Kab. Mojokerto	96/KPTS/Ses- Prov.014/ VII/2015, tgl. 27/8/2015 96/	Ringan : Teguran Lisan
8	ADI AGUNG W.			Provinsi Jawa Timur		Ringan : Teguran Lisan
9	ANTON YULIONO, SH, MAP	19610712 198502 1 001	IV/a	Provinsi Jawa Timur	97/KPTS/Ses- Prov.014/ X/2015, tgl.	Ringan : Teguran Tertulis

					7/9/2015	
No.	Nama Pegawai	NIP	Gol	Satker/ Instansi	Surat Dinas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
10	ACH. SUHARI	19810517 200811 1 001	II/b	Provinsi Jawa Timur	98/KPTS/Ses- Prov.014/ X/2015, tgl. 7/9/2015	Ringan : Teguran Tertulis
11	ANTON YULIONO, SH, MAP	19610712 198502 1 001	IV/a	Provinsi Jawa Timur	103/KPTS/Ses -Prov.014/ X/2015, tgl. 26/10/2015	Ringan : Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (kedua)
12	ACH. SUHARI	19810517 200811 1 001	II/b	Provinsi Jawa Timur	104/KPTS/Ses -Prov.014/ X/2015, tgl. 26/10/2015	Ringan : Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (kedua)
13	Ir. NANIEK YUNIATI, SH	19630610 199903 2 002	III/d	Provinsi Jatim	323/Ses- Prov.014/VI/2 015, tgl. Juni 2015	Ringan : Panggilan masuk kantor I
14	SYAIFUL RACHMAN, S.Pd	19770323 200811 1 001	III/b	Kab. Mojokerto	774/Seskab- 014.329790/X II/2015, tgl. 3/12/2015	Usulan
15	YHOEDY FAOEZAN	19800914 2002 1 007	II/d	Kab. Mojokerto	774/Seskab- 014.329790/X II/2015, tgl. 3/12/2015	Usulan
16	EBNU WASTU PRAMUKA JAYA	19790118 200701 1 004	II/a	Kab. Mojokerto	774/Seskab- 014.329790/X II/2015, tgl. 3/12/2015	Usulan
17	IMAM WAHYUDI, SE	19790625 201012 1 001	III/B	Kab. Ponorogo	1462/KPU.Ka b.014-329857, tgl. 28/12/2015	Usulan

Catatan :

- HDTR = hukuman disiplin tingkat ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis) ;
- HDTs = hukuman disiplin tingkat sedang (penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun) ;
- HDTB = hukuman disiplin tingkat berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat).

Dari tabel 3.12. dan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa target capaian kinerja untuk output kegiatan ini terealisasi 1

(satu) laporan mendukung sasaran kegiatan dalam bidang pengembangan SDM KPU Provinsi Jawa Timur.

c) Kenaikan Gaji Berkala.

Secara normative Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur diproses sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Selama bulan Januari s.d Desember 2015, KGB yang dilayani dan diproses Provinsi sebanyak 10 sepuluh) berkas untuk ASN KPU Provinsi Jawa Timur (1 laporan), sebagaimana data pada tabel 3.13, sebagai berikut :

Tabel 3.13
DAFTAR PNS YANG DIUSULKAN KENAIKAN GAJI BERKALA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	TMT
1	2	3	4	6
1	M. NASHRULLOH AKBAR, SH	19870719 200912 1 001	III/b	1 Januari 2016
2	DINA LESTARI, S.IP	1982102520 0912 2 002	III/b	1 Januari 2016
3	ANDHIKA, SE	19841026 200912 2 003	III/b	1 Januari 2016
4	ULFA LAILY, SE	19720312 200811 2 001	III/b	1 Januari 2016
5	DWI SETYO HARTOKUMORO, A.Md	19800618 200811 1 002	II/d	1 Januari 2016
6	HARI W. PRASODJO, A.Md	19760513 200811 1 001	II/d	1 Januari 2016
7	ADE AGUNG	19781124 200811 1 001	II/b	1 Januari 2016
8	DWI PRANOTO	19831202 200811 1 001	II/b	1 Januari 2016
9	DARMAJI	19790608 200811 1 001	II/b	1 Januari 2016
10	DEDIT SETIAWAN	19770205 200811 1 002	II/b	1 Januari 2016

- d) Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan dan pengukuhan sumpah janji Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

TABEL 3.14
DAFTAR PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

NO	TGL/ BLN/ TAHUN	KAB/KOTA	YANG DI GANTI	PENGGANTI	NIP	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6	7
1	11/06/ 2015	BONDOWOSO	MIKE NURHIDYAH	A.FAUZAN	19790729 201001 1 013	KASUBBAG HUKUM
2		PROBOLINGGO	-	ANDRI WIJANTO	19691227 199402 1 001	KASUBBAG PROGRAM/DATA
3		KOTA BATU	AL MUTA'IN	BADRUT TAMAM	19700117 200501 1 007	KASUBBAG HUKUM
4		PASURUAN	SUGENG MARYADI	BAMBANG SUPRPTO	19680229 198802 1 001	KASUBBAGTEKNIS PEMILU & HUPMAS
5		SIDOARJO	HARI SUBAGIO	CHOIRUL ANAM	19760809 199511 1 002	KASUBBAG UMUM
6		KOTA BATU	MAWARDI	DIANA FITRIANTI	19780130 200312 2 002	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
7		PROBOLINGGO	-	DODIK BUDIANTO	19720229 199502 1 002	KASUBBAG HUKUM
8		KOTA BATU	SUGIARSO	FTRYA FARADEVI	19761016 200604 2 015	KASUBBAG UMUM
9		GRESIK	MAKHSUN	GELAR PRATAMA	19850501 200912 1 004	KASUBBAG PROG/DATA
10		KOTA KEDIRI	THAHJA WULAN P	HENNY NURDIANI	19790330 200710 2 001	KASUBBAG HUKUM
11		KOTA MALANG	-	IFFATUNNISA	19810430 200811 2 001	KASUBBAG PROG/DATA
12		KOTA PASURUAN	ADAM WAHYUDI	ISWINARSIH	19650806 198703 2 016	KASUBBAGUMUM
13		GRESIK	DIDIK BUDIONO	MAKHSUN	19720530 200811 1 001	KASUBBAG UMUM
14		PONOROGO	THJATUR PRIHANDOKO	MARNO	19730908 199203 1 001	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
15		KOTA BATU	KASMARI	M.SUDIRMAN	19621225 199203 1 004	KASUBBAG PROG/DATA
16		LAMONGAN	-	NIKMAH	19690515 200901 2 002	KASUBBAG HUKUM
17		PROBOLINGGO	-	PURNOMO	19620420 198603 1	KASUBBAG TEKNIS PEMILU &

					013	HUPMAS
18		TOBAN	SUHARTONO	RIZKI YULI	19830726 200912 2 002	KASUBBAGTEKNIS PEMILU & HUPMAS
19		PROBOLINGGO	-	SUDARSO	19620327 198603 1 020	KASUBBAG UMUM
20		PASURUAN	LILIK WIJAYATI B UTAMI	TEGUH BUDI SANTOSO	19630815 198612 1 002	KASUBBAG UMUM
1	01/07/ 2015	KOTA KEDIRI	YUDIONO, ST.,MM	ARIF SURYAWAN SIREGAR, S.IP	19820718 200912 1 001	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
2		SITUBONDO	Drs. WIYONO, M.Si	ZAINUDDIN ANIS, SE	19691216 198903 1 005	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
3		SITUBONDO	AUNUR ROFIQ	WUWUH LASMINI, SH	19610609 198303 2 009	KASUBBAG UMUM
4		SITUBONDO	IMRON ROSADI, SH	EWILDA RUBI WIDODO, SH	19810301 200501 1 005	KASUBBAG HUKUM
5		KPU PROV.JATIM	SUWANDI, S.Sos.,M.Si	ANTON YULIONO, SH.,MAP	19610712 198502 1 001	KASUBBAG HUKUM
6		KPU PROV.JATIM	YULYANI DEWI, ST	SUWANDI, S.Sos.,M.S	19690510 199003 1 010	KASUBBAG PROG/DATA
7		KPU PROV.JATIM	ANTON YULIONO, SH.,MAP	YULYANI DEWI, ST	19770712 200811 2 001	KASUBBAG KEUANGAN
8		KPU PROV.JATIM	AZIS BASUKI, SE	AGUS NUGROHO, SE	19700806 200901 1 001	KASUBBAG UMUM
9		KPU PROV.JATIM	ADI DJUANA, S.IP	AZIS BASUKI, SE	19761116 200811 1 001	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
1	01/08/ 2015	JEMBER		Drs. HADI SUSILO, S.Si	19640817 199303 1 012	SEKRETARIS
2		TULUNGAGUNG		LILIK WIJAYATI, SH., MH	19630817 199903 2 009	SEKRETARIS
1	01/09/ 2015	SUMENEP	MOHAMMAD MOCHTAR	MISDIYANTO, SH	19670502 199007 1 001	KASUBBAG HUKUM
2		KEDIRI	RINDRASA KARYAWANTO	IMAM BASUKI, SE	19771118 200701 1 003	KASUBBAG UMUM
3		KEDIRI	IMAM BASUKI, SE	PUSPITA PALUPI, S.Sos	19790531 200701 2 002	KASUBBAG PROG/DATA
1	01/12/ 2015	KOTA PASURUAN	ISWINARSI, SH (MENINGGAL)	MOH. ILYAS PURWO AGOMO, SIP	19820118 200912 1 003	KASUBBAG UMUM
2		SUMENEP	Drs. ATNAWI	ADI TRI HARTANTO, S.Kom	19840904 201012 1 001	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
3		SUMENEP	SYAIFUL BAHRI	HENRY WIJAYA, SIP	19840217 201012 1 001	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
4		KOTA MOJOKERTO	BOGIK ENDUNG KISWORO	DIKRILLIA A RIZKI ERTIKA ADI, SE	19861210 200912 2 003	KASUBBAG UMUM

5		KOTA MOJOKERTO	AGUS ZAINAL, SH	SAFITRI NURDIN, SE	19751008 200912 2 001	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
6		KOTA MOJOKERTO	AKHMAD ZAINI, SH	SUMINTO, SH	19620525 198603 1 002	KASUBBAG HUKUM
7		KOTA MOJOKERTO	EDY FRIJANTO, S. Sos	SAHUDI, SH	19650812 198903 1 020	KASUBBAG PROG/DATA
8		KAB. JEMBER	SUSILO HADI, S.Si	ROHIMIN, S. Sos	19660207 199003 1 007	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
9		KOTA SURABAYA		Drs. ANDAM RIYANTO	010 236 637	KASUBBAG PROG/DATA
10		KAB. BLITAR		Drs. SUPRIYANTO	19630210 198603 1 005	KASUBBAG PROG/DATA

e) Alih Status Pegawai

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas, professional dan mandiri di lingkungan Sekretariat KPU seluruh Indonesia, KPU telah memberikan kesempatan kepada ASN Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota yang dipekerjakan di lingkungan Sekretariat KPU untuk beralih status menjadi Pegawai Organik KPU.

Proses alih status dari pegawai DPK menjadi Pegawai Organik KPU ini merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa pegawai KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab./Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian, dengan pejabat Pembina kepegawaian adalah Sekretaris Jendral KPU.

Data terakhir, total pegawai KPU Kab/Kota se Jawa Timur sejumlah 1.012 orang yang terdiri dari PNS Organik sebanyak 374 orang, PNS dipekerjakan (dpk) sebanyak 346 orang dan tenaga kontrak sebanyak 292 orang.

Dari data tersebut, berarti jumlah PNS dpk hampir sama dengan PNS Organik yang ada saat ini, sehingga banyak PNS dpk yang mulai melakukan proses alih status. Pada tahun 2015 sekitar 69 orang yang mengikuti proses seleksi alih di status yang diselenggarakan KPU RI di Surabaya, lihat tabel 3.16 di bawah.

TABEL 3.15
DAFTAR PEGAWAI DAERAH (DPK) YANG MENGIKUTI ALIH STATUS
MENJADI PEGAWAI KPU
DIM LINGKUNGAN KPU SE JAWA TIMUR
TAHUN 2015

No.	SATKER	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Batu	Hermawan Setiaji, SE	197429 200604 1 007	III/c	Fungsional Umum (PPK)	Pemerintah Kota Batu
2		Sudari	19680909 199303 1 010	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kota Batu
3		Sumaryadi	19720809 199303 1 005	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kota Batu
4		Prasetiya Dwi Palupi, SE	19750609 200701 1 007	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kota Batu
5		Joko Sulistyio	19820929 200801 1 013	II/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kota Batu
6		Samsul Arifin	19821223 200701 1 005	II/a	Fungsional Umum	Pemerintah Kota Batu
7	Kabupaten Bojonegoro	Teguh Setiyo Utomo, S.Sos	19780620 200701 1 005	II/b	Fungsional Umum (Bendahara Pengeluaran)	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
8		Suprpto, SH	19680402 199202 1 004	III/c	Kasubbag Hukum (PPK)	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
9	Kabupaten Nganjuk	Adi, SH, MM	19630612 199202 1 003	III/c	Kasubbag Hukum	Pemerintah Kabupaten Nganjuk
10		Kristanto, AMP	19720517 199201 1 002	III/c	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Pemerintah Kabupaten Nganjuk
11		Drs. Soebijono Agoes Prabawa, MM	19630803 198603 1 014	IV/a	Kasubbag Program dan Data	Pemerintah Kabupaten Nganjuk
12		Bekti Rochani, SE, M.Si	19650426 198503 2 007	III/d	Kasubbag Umum	Pemerintah Kabupaten Nganjuk
13		Nurhasim	19640315 199111 1 001	III/b	Fungsional Umum (Pejabat Penerima Barang)	Pemerintah Kabupaten Nganjuk
14	Kabupaten Madiun	Agung Dwi Murdianto, S.Sos	19711107 199803 1 006	III/d	Kasubbag Program dan Data (Penguji SPM)	Pemerintah Kabupaten Madiun
15		Pujo Lambang Pamungkas, SH	19690801 199602 1 002	III/d	Kasubbag Hukum	Pemerintah Kabupaten Madiun

No.	SATKER	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	2	3	4	5	6	7
16		Slamet	19630822 198203 1 003	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Madiun
17		Badri Ilyas Suwardi, S.Sos	19650818 199403 1 015	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Madiun
18		Dwi Gunawan	1969011019 9003 1 011	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Madiun
19		Endy Setyawan	19790104 200501 1 010	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Madiun
20		Teguh Mulyono Sugiharto	19771010 200212 1 006	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Madiun
21		Mochamad Kholil	19751106 200212 1 003	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Madiun
22	Kota Madiun	Sumarsono, S.Sos	19670110 199203 1 008	III/d	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Pemda Kota Madiun Bakesbang Pol dan Linmas
23		Suparmin	19691127 200212 1 002	II/a	Fungsional Umum	Pemda Kota Madiun Bakesbang Pol dan Linmas
24	Kabupaten Jombang	Heri Subagyo, SE, M.Si	19681112 199003 1 009	III/c	Kasubbag Umum (PPK)	Pemerintah Kabupaten Jombang
25		Samsul Hudha, SE	19660207 198603 1 007	III/d	Kasubbag Program dan Data	Pemerintah Kabupaten Jombang
26		Achmad Saifuddin, SH	19651130 198603 1 013	IV/a	Kasubbag Hukum	Pemerintah Kabupaten Jombang
27	Kabupaten Pasuruan	Slamet Budiarto	19720919 199602 1 001	III/a	Fungsional Umum (Pejabat Penerima Barang)	Pemerintah Kabupaten Pasuruan
28		Yudha Siaga, SH	19640802 198603 1 019	III/d	Kasubbag Hukum (Penguji SPM)	Pemerintah Kabupaten Pasuruan
29	Kota Pasuruan	Edi Hartono, SH	19650610 199202 1 002	III/d	Kasubbag Program dan Data (PPK)	Pemerintah Kota Pasuruan
30	Kabupaten Sampang	Sri Widiani, SH, M.Si	19790116 199803 2 001	III/c	Kasubbag Hukum	Pemerintah Kabupaten Sampang
31		Mudhar, S.Sos, M.Si	19641108 198903 1 010	III/c	Kasubbag Umum	Pemerintah Kabupaten Sampang
32		Sitti Sundari	19701224 200604 2 007	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Sampang
33		Musaddab	19661220 200901 1 002	II/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Sampang

No.	SATKER	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	2	3	4	5	6	7
34		Qurrotul Ainy, S.Sos, M.Si	19690324 198903 1 010	III/c	Kasubbag Program dan Data	Pemerintah Kabupaten Sampang
35	Kabupaten Malang	Anang Santoso, S,Sos, M.AP	19650615 198703 1 017	III/d	Kasubbag Umum	Pemerintah Kabupaten Malang
36	Kabupaten Sumenep	Dra. Dewiyani, MM	19670324 198712 2 003	III/d	Kasubbag Umum	Pemerintah Kabupaten Sumenep
37	Kabupaten Bangkalan	Panji Kuncoro, S.IP, MM	1971 1028 199102 1 001	IV/a	Kasubbag Hukum	Pemerintah Kabupaten Bangkalan
38		Sidik, SE	19671207 200701 1 020	III/a	Fungsional Umum (Bendahara Pengeluaran)	Pemerintah Kabupaten Bangkalan
39	Kabupaten Mojokerto	Drs. Wayiadi	19660904 198709 1 001	III/d	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pemerintah Kabupaten Mojokerto
40		Ciptadi Eko Setyawasono	19870120 200604 1 004	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Mojokerto
41		Wihadi Sandjaja, SS	19800129 200604 1 006	II/c	Fungsional Umum (Staf Pengelola Keuangan)	Pemerintah Kabupaten Mojokerto
42		Muhamad Nasrul Fajar	19780106 200212 1 006	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Mojokerto
43		Noradila Qibtyya	19790204 200212 2 007	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Mojokerto
44	Kabupaten Magetan	Hari Prasetyo	19661028 199202 1 001	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Magetan
45		Sundarso, S.Sos	19670713 200202 1 006	III/a	Fungsional Umum (Bendahara Pengeluaran)	Pemerintah Kabupaten Magetan
46		Tutik Setianingsih	19700810 200501 2 016	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Magetan
47		Marsiyah, SE	19810919 200501 2 010	II/c	Fungsional Umum (Bendahara Pengeluaran)	Pemerintah Kabupaten Magetan
48	Kabupaten Bondowoso	Anik Suryaningsih, SE	19700408 199803 2 004	III/a	Fungsional Umum (Staf Pengelola Keuangan)	Pemerintah Kabupaten Bondowoso
49		Sis Hermanto	19730428 20012 1 003	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Bondowoso
50		Andrie Bactiar Sadeq	19781202 200312 1 005	II/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Bondowoso

No.	SATKER	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	2	3	4	5	6	7
51	Kabupaten Jember	Drs. Hadi Susilo	1964 0817 199303 1.012	III/d	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kab. Jember	Pemerintah Kabupaten Jember
52		Drs. S u t o k o	19650603 198603 1 017	III/c	Kasubbag Umum (Penguji Tagihan SPM)	Pemerintah Kabupaten Jember
53		Tamin Hariyanto	19670923 198803 1 007	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Jember
54		Rohimin	19660207 199003 1 007	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Jember
55	Kabupaten Pacitan	Bambang Sutejo, S.Sos	19681020 198903 1 006	III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan pada Sekretariat KPU Kab. Pacitan	Pemerintah Kabupaten Pacitan
56	Kabupaten Lamongan	Teguh Subgyo, SH, MM	19640707 199202 1 003	III/d	Kasubbag Hukum	Pemerintah Kabupaten Lamongan
57		Drs. Joko Saronto, MM	19640411 199202 1 002	III/d	Kasubbag Program dan Data (PPK)	Pemerintah Kabupaten Lamongan
58		Aslikan	19640305 198703 1 017	III/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Lamongan
59		Emy Widyawati Pahya, A.Md	19780319 201001 2 001	II/d	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Lamongan
60		Suhartono	19710220 200701 1 011	II/b	Fungsional Umum (Staf Pengelola Keuangan)	Pemerintah Kabupaten Lamongan
61	Kabupaten Blitar	Drs. Supriyanto	19630210 198603 1 000	III/d	Kasubbag Program dan data (PPK)	Pemerintah Kabupaten Blitar
62	Kabupaten Situbondo	Zainuddin Anis, SE	19691216 198903 1 005	III/d	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kab.Situbondo	Pemda Kabupaten Situbondo
63	Kabupaten Tuban	Kusno Nugroho	19720323 199202 1 002	III/d	Kasubbag Program dan Data (PPSPM, PPK)	Pemerintah Kabupaten Tuban
64		Suhartono, S.Sos	19671230 199302 1 004	III/d	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kab. Tuban (PPK)	Pemerintah Kabupaten Tuban
65	Kabupaten Probolinggo	Butswati Sanda Toding, A.Md	19771025 200212 2 006	III/a	Fungsional Umum (Staf Pengelola Keuangan)	Pemerintah Kabupaten Probolinggo
66	Kab. Ngawi	Popong Anjarseno, S.STP	19801018 199912 1 001	III/d	Kasubbag Program dan Data (PPSPM)	Pemerintah Kabupaten Ngawi

No.	SATKER	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	2	3	4	5	6	7
67		Parti	19692705 199103 2 001	III/c	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Ngawi
68		Agus Budiyo	19700826 199303 1 011	III/b	Fungsional Umum	Pemerintah Kabupaten Ngawi
69	Kab. Trenggalek	Puguh Budi Utomo, SE		III/d	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Kegiatan test tulis alih status di lingkungan KPU Kab/Kota se Jawa Timur dilaksanakan di KPU Kota Surabaya pada hari Sabtu – Minggu, tanggal 5 – 6 Desember 2015, dari data tabel di atas, ada 4 (empat) pegawai yang mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan proses alih status tahun 2015, yaitu :

- 1) Drs. HADI SUSILO dari KPU Kabupaten Jember ;
- 2) TEGUH SUBAGYO, SH, MM dari KPU Kab. Lamongan ;
- 3) SUHARTONO, S.Sos dari KPU Kab. Tuban ;
- 4) SIS HERMANTO dari KPU Kab. Bondowoso.

f) Mutasi Pegawai

Mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Transfer terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting

dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan.

TABEL 3.16
DAFTAR MUTASI PNS
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

No	Nama Pegawai	NIP	GOL	KPU Asal	KPU Tujuan	TMT
1	2	3	4	5	6	7
1	PRADINI CITRA AMALIA, SH	19870428 200912 2 001	(III/b)	KPU KAB. TUBAN	KPU PROV. JAWA TIMUR	1/6/2015
2	GALIH TRIATMOJO, S.Kom	19860326 201012 1 005	(III/b)	KPU KAB JOMBANG	KPU KAB. MAGELANG	1/9/2015
3	ARI WIDHIASTUTI, S.Sos	19841129 201012 2 002	(III/a)	KPU KAB. PONOROGO	KPU KAB. WONOGIRI	1/9/2015
4	ADI DJUHANA, S.IP	19710910 200811 1 001	(III/b)	KPU PROV. JAWA TIMUR	KPU RI	1/6/2015
5	ISNAWAN ARDIANSYAH, ST	19820831 201012 1 002	(III/b)	KPU KAB. PROBOLINGGO	KPU KAB. MALANG	1/9/2015
6	ELOK FAIQOH, SE	19841208 200912 2 003	(III/a)	KPU KOTA PROBOLINGGO	BPBD JAKARTA	
7	HERU CAHYONO, A.Md	19840218 200912 1 003	(II/d)	KPU KAB. NGANJUK	KPU KOTA MADIUN	
8	MEI TRIASTUTI, S.IP	19830501 201012 2 004	(III/b)	KPU KAB. PROBOLINGGO	KPU KAB. PACITAN	1/9/2015
9	RAHMA TINOVA, SE	19801125 201012 2 001	(III/a)	KPU KAB. PROBOLINGGO	KPU KAB. SIDOARJO	1/9/2015
10	GALIH MARGANINGRAT,A.Md	19860305 200912 1 006	(II/d)	KPU KOTA MALANG	KPU KOTA PROBOLINGGO	1/6/2015
11	EDDY PRAYITNO, SE., MM	19840401 201212 1 006	(III/b)	KPU KAB. BANGKALAN	KPU PROV. JAWA TIMUR	
12	MUKHLISIN, A.Md.Kom	19841029 200912 1 001	(II/d)	KPU KOTA PROBOLINGGO	KPU KAB. PROBOLINGGO	
13	SUWARNO, SE	19780105 201012 1 001	(III/a)	KPU KAB. BOJONEGORO	KPU KAB. SRAGEN JATENG	1/9/2015
14	DEDI RAHMAT WAHAB, SH	19860104 201012 1 004	(III/a)	KPU KAB. BOJONEGORO	KPU KOTA MOJOKERTO	1/9/2015
15	TITOK EKO HARTANTO, SE	19750605 200912 1 002	III/a	KPU KAB. MAGETAN	KPU KOTA JAKARTA SELATAN	1/6/2015
16	Dra. NANIK KARSINI, M.Si	19670701 199501 2 001	IV/b	KPU RI	KPU KAB. MAGETAN	1/9/2015

No	Nama Pegawai	NIP	GOL	KPU Asal	KPU Tujuan	TMT
1	2	3	4	5	6	7
17	IKA KURNIA PALUPI, SAB	19860911 201012 2 004	III/b	KPU KAB. GRESIK	KPU KAB. KEDIRI	1/9/2015
18	MUHAMMAD CHOIRULLAH PULUNGAN, SH	19830505 200902 1 006	III/B	KPU KAB. SAMPANG	KPU KOTA BEKASI	1/9/2015
19	ADITYARINNI NUGRAHAYU, SE	19810820 200912 2 002	III/b	KPU KAB. MALANG	KPU KOTA BATU	1/9/2015
20	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, SAB	19840103 200902 1 005	III/b	KPU KAB. BANGKALAN	KPU KAB. JEPARA	1/9/2015
21	DANDY SETIAWAN, S.IP	19840523 201012 1 004	III/b	KPU KAB. LAMONGAN	KPU KAB GROBOGAN	1/9/2015
22	SUJAI, SH	19820908 200912 1 004	III/b	KPU KAB. BANGKALAN	KPU KAB. LAMONGAN	1/10/ 2015
23	SHOLEHUDIN ZUHRI, SH	19850816 201012 1 004	III/b	KPU KAB. PAMEKASAN	KPU KOTA BEKASI	1/10/ 2015
24	ZAINUDIN MAHFUD, S. Kom	19840430 200912 1 003	(III/a)	KPU KAB. BANGKALAN	KPU KOTA BATU	1/6/2015

g) Untuk Kasus Perceraian yang telah diajukan berkasnya pada tahun 2015.

Kasus perceraian PNS di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tergolong sangat rendah, dibuktikan sampai berakhirnya tahun 2015, hanya satu kasus yang diajukan ke BAPERJAKAT, sebagaimana tabel 3.17 di bawah ini :

TABEL 3.17
DAFTAR PERCERAIAN PNS
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Satker/KPU	Keterangan
1	2	3	4	8	9
1	ADITYA ANTON SUSILOTOMO	19851119 200912 1 000	II/d	Banyuwangi	Usulan Nomor : 237/Ses- Kab.014- 329662/IX/2015, tgl. 11/09/2015

h) Seleksi Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur.

Sejak awal Oktober 2014, jabatan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur mengalami kekosongan setelah JONATHAN JUDIANTO, MM, MMT mendapatkan tugas dari Gubernur Jawa Timur untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Korwil Pamekasan.

Dalam masa kekosaongan jabatan tersebut, Sekretaris Jenderal KPU RI dengan surat nomor : 39/SP/X/2014 tanggal 27

Oktober 2014 menunjuk Drs. ARIES GATOT SUBAGYO sebagai pejabat pelaksana tugas (PLT) Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur sampai dengan dilantiknya pejabat definitive.

Selanjutnya, mengacu kepada peraturan kepegawaian yang terbaru, ada langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI untuk menunjuk Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur adalah melalui Seleksi Jabatan (menjadi 1 laporan target capaian kinerja), sebagaimana kronologis berikut ini :

- Sekretaris Jenderal KPU RI melalui surat Nomor 188/SJ/II/2015 tertanggal 13 Pebruari 2015, yang intinya bahwa perlu adanya pengisian jabatan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur melalui seleksi terbuka.
- Ditindak lanjuti oleh Tim Seleksi dengan Nomor 01/TIMSEL-SES-PROV/II/2015, bulan Pebruari 2015 perihal Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015.
- Sekretaris Jenderal KPU RI melalui surat Nomor 333/SJ/II/2015 tertanggal 3 Maret 2015 perihal Ralat Surat Sekjen KPU Nomor 188/SJ/II/2015 tertanggal 13 Pebruari 2015.
- Ditindak lanjuti oleh Tim Seleksi dengan Nomor 03/TIMSEL-SES-PROV/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Ralat Pengumuman Nomor 01/TIMSEL-SES-PROV/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 perihal Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015.
- Ditindak lanjuti oleh Tim Seleksi dengan Nomor 05/TIMSEL-SES-PROV/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015, yang intinya bahwa perlu adanya perpanjangan pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015, karena masih baru 5 peserta yang mendaftarkan diri untuk jabatan tersebut, belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Pengumuman Tim Seleksi dengan Nomor 07/TIMSEL-SES-PROV/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015, diantaranya :

No (1)	Nama (2)	NIP (3)	Pangkat (4)	Instansi Asal (5)
1	Drs. AKHMAD SUDJONO, MM	19600510 198603 1 008	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Provinsi Jawa Timur
2	Drs. SUPRAYITNO, M.Si	19580119 198502 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	HM. E. KAWIMA, SH, M.Si	19660623 199403 1 005	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Kab. Jember
4	Drs. MOHAMMAD MAFACHIR, MM	19590122 198603 1 013	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Kab. Tulungagung
5	Drs. Ec. ARIS GATOT SUBAGYO	19590505 199203 1 007	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Provinsi Jawa Timur

- Pengumuman Tim Seleksi Nomor 13/TIMSEL-SES-PROV/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Peserta yang memenuhi persyaratan Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015, diantaranya :

No (1)	Nama (2)	NIP (3)	Pangkat (4)	Instansi Asal (5)
1	Drs. AKHMAD SUDJONO, MM	19600510 198603 1 008	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Provinsi Jawa Timur
2	Drs. Ec. ARIS GATOT SUBAGYO	19590505 199203 1 007	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Provinsi Jawa Timur
3	HM. E. KAWIMA, SH, M.Si	19660623 199403 1 005	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Kab. Jember
4	Drs. MOHAMMAD MAFACHIR, MM	19590122 198603 1 013	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Kab. Tulungagung
5	Drs. SUPRAYITNO, M.Si	19580119 198502 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- Pengumuman Tim Seleksi Nomor 15/TIMSEL-SES-PROV/IV/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Peserta yang lolos dan menduduki rangking 3 (tiga) Teratas Seleksi Terbuka Jabatan

Sekretaris di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015, diantaranya :

No	Nama	NIP	Pangkat	Instansi Asal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Drs. Ec. ARIS GATOT SUBAGYO	19590505 199203 1 007	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Provinsi Jawa Timur
2	Drs. SUPRAYITNO, M.Si	19580119 198502 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	HM. E. KAWIMA, SH, M.Si	19660623 199403 1 005	Pembina Tingkat I (IV/b)	KPU Kab. Jember

- Dari ketiga calon di atas, untuk menentukan pejabat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur akan diadakan Fit and Propertest oleh KPU RI di Jakarta.
- Pada bulan April 2015 diselenggarakan fit anf propertest di KPU RI Jakarta.

Akhirnya tanggal 13 Mei 2015 diadakan pelantikan terhadap HM. E. KAWIMA, SH, MM sebagai Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Sekjen KPU RI Nomor : 298/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, tertanggal 12 Mei 2015 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kab. Jember dan Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur.

2. Indikator kinerja Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia menetapkan target 100 orang dengan bobot 100 % merupakan salah satu alat untuk mencapai sasaran ini.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan di lingkungan Sekretariat KPU perlu terus ditingkatkan. Salah satu langkah konkrit dan strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis aparatur pemerintah adalah dengan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), baik yang bersifat "Pre-Service Training" (Diklat Prajabatan) maupun "In-Service

training" (Diklat dalam jabatan struktural dan fungsional), sehingga kemampuan dan keahlian para aparatur pemerintah semakin berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Output kegiatan untuk mendukung indikator kinerja tersebut adalah layanan peningkatan kompetensi SDM, yang diarahkan untuk diklat teknis dan diklat kepemimpinan tingkat IV tahun 2015. Alokasi anggaran yang diberikan untuk output kegiatan ini adalah sebesar Rp. 306.062.000, yang terealisasi sebesar Rp. 270.060.000 atau sekitar 88,24 %.

Realisasi dari capaian kinerja yang ditargetkan sebanyak 100 orang dengan bobot 100 %, dapat dicapai, bahkan melebihi dari target yaitu sebanyak 150 orang dengan bobot 150 %, antara lain : pegawai mengikuti diklat prajabatan, 3 orang pejabat mengikuti Diklatpim Tingkat IV, dan 80 orang mengikuti diklat keprotokolan dan manajemen keuangan di lingkungan KPU se Jawa Timur, serta sebanyak 63 orang staf di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM melalui Outbond (SPK Nomor : 08/SPK-PBJ/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 dan SPK Nomor : 09/SPK-PBJ/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, SPK Nomor : 14/SPK-PBJ/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015).

Tabel 3.18
DAFTAR PEGAWAI YANG BELUM MENGIKUTI DIKLATPIM TK.
II/III/IV DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

No	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	DIKLAT PIM	TEMPAT	STATUS KEPEGAWAIAN
1	HM. E. KAWIMA, SH.,M.Si. NIP. 19660623 199403 1 005	IV/b	Sekretaris KPU Prov. Jatim	PIM III	Jember	PNS. Daerah Dpk
2	Drs. Ec.ARIS GATOT SUBAGYO. NIP. 19590505 199205 1 007	IV/b	Kabag. Keuangan ,Umum dan Logistik	PIM II	Surabaya	PNS. Daerah Dpk
3	Drs. AKHMAD SUDJONO, MM. NIP. 19600510 198603 1 018	IV/b	Kabag.Program,Data , Organisasi dan SDM	PIM III	Surabaya	PNS. Daerah Dpk

4	SLAMET SETIJOADJI, SH. NIP. 19621021 198703 2 006	IV/a	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas	PIM IV	Surabaya	PNS. Daerah Dpk
5	ANTON YULIONO, SH NIP. 19610712 198502 1 001	IV/a	Kasubbag. Hukum			PNS. Daerah Dpk
6	NUGRHANDINI RPA, SH. NIP. 19670805 199503 2 001	III/d	Kasubbag. Organisasi dan SDM	PIM IV	Malang	PNS. Daerah Dpk
7	SUWANDI, S.Sos., M.Si. NIP. 19690510 1999003 0 010	III/d	Kasubbag. Program dan Data	PIM IV	Surabaya	PNS. Daerah Dpk
8	AZIS BASUKI, SE. NIP. 19751116 200811 2 002	III/c	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	PIM IV	Malang	PNS. Pusat
9	YULYANI DEWI, ST. NIP. 19770712 200811 2 001	III/c	Kasubbag. Keuangan	PIM IV	Malang	PNS. Pusat
10	AGUS NUGROHO, SE. NIP. 19700806 200901 1 001	III/b	Pj. Kasubbag. Umum dan Logistik			PNS. Daerah Dpk

Dalam tahun anggaran 2015, KPU Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan ketrampilan kinerja aparatur teknis dan fungsional, telah mengadakan 2 (dua) kali pelatihan dan pendidikan, yaitu :

- a) Diklat Keprotokolan Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang dari Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota, lihat tabel 3.19.
- b) Diklat Manajemen Keuangan Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang dari Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota, lihat tabel 3.20.

Selain itu, dalam upaya pengembangan, peningkatan serta memupuk rasa koordinasi, kerjasama dan silaturahmi antar staf di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur, diselenggarakan kegiatan pengembangan Sumberdaya Manusia (outbound) selama 2 hari di luar kantor, lihat tabel 3.21 di bawah.

Tabel 3.19
DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

NO	KPU KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	JABATAN	
1	PACITAN	MEI TRI ASTUTI, SIP	19830501 201012 2 004	Penyusun Laporan Akuntabilitas	1
2	PONOROGO	SINGGIH CAHYONO	19750714 200701 1 007	Pembuat Daftar Gaji	
3	TRENGGALEK	AL IMRON	19790914 200710 1 001	Protokol	3
4	TULUNGAGUNG	SUTRIONO	19740606 200012 1 001	Pendokumentasi Kehumasan	
5	BLITAR	DESHINTA CHRISTY AMALIA, SIP	19861202 200912 2 002		5
6	KEDIRI	IKA KURNIA PALUPI, S.AB	19860911 201012 2 004	penyusunan Bahan Pembinaan Kepegawalan	
7	MALANG	HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI, SH	19850404 200912 2 003	Penyusun Bahan Informasi Per- UU an	7
8	LUMAJANG	MITA CHRISTINA, SH	19790510 200912 2 001	Penyusunan Bahan Infrmasi Per-UU an	
9	JEMBER	PURWANTO	19720825 2014 1 001	Koordinator Pengamanan	9
10	BANYUWANGI	NANIK SULISTYORINI, SH	19850716 201012 2 002	Analisis Hukum	
11	BONDOWOSO	FAHRUROZHI MASHURI, SP	19840407 200902 1 003	Penyusunan Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	1
12	SITUBONDO	ELISA KUSTANTY, SE	19780221 200701 2 002	Penganalisis Organisasi Sistem Pemilu	
13	PROBOLINGGO	NUR ALYAH, SE	19820906 201407 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1
14	PASURUAN	SULISTIANAH	19770511 200701 2 002	Verifikator Keuangan	
15	SIDOARJO	DENNY FERDIANSYAH	19830220 200910 1 001	Protokol	
16	MOJOKERTO	RENNY OKTORA W, S.Sos	19821029 200912 2 001	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawalan	
17	JOMBANG	HENNY PURWANINGTYAS S, SE	19750413 200701 2 001	Penelaah Pengelolaan Keuangan	
18	NGANJUK	HENI RIASTUTIK	19830322 2010 2 002		
19	MADIUN	SUDARMAJI ARIWIBOWO, S.Kom	19761008 200912 1 002	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data & Informasi	
20	MAGETAN	SUGIARTO	19810118 200910 1 001	Protokol	
21	NGAWI	IKATRINA ROSYIDAH, A.Md	19840318 200902 2 008	Verifikator Keuangan	

NO	KPU KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
22	BOJONEGORO	ROCHMAD	19691001 200701 1 009	Protokol
23	TUBAN	SUGIHANDOYO	19670610 200701 1 001	Koordinator Pengamanan
24	LAMONGAN	AMI FITRIYAH	19830307 201407 2 002	
25	GRESIK	TITIEN PRIHATINI, SH	19810220 201012 2 001	Penyusun Bahan Informasi Per-Uuan
26	BANGKALAN	TRI YULI WANDA	19850701 200604 2 010	Penyaji Informasi Kepegawalan
27	SAMPANG	SITI NUR AINI, A.Md	19790102 200902 2 003	Pengadministrasi Umum
28	PAMEKASAN	MOH. SYAIFUL RAMADHAN	19790807 200701 1 001	
29	SUMENEP	MISDIYANTO, SH	19670502 199007 1 001	KASUBBAG HUKUM
30	KOTA KEDIRI	ANNISAA DYAH KUSUMA, SE	19850706 200910 2 001	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data
31	KOTA BLITAR	SHANTI ANDRIANI, A.Md	19890301 200902 2 007	Pengadministrasi Umum
32	KOTA MALANG	YOGA TRIYANTO, ST	19750603 200912 1 001	Penyusun Bahan Informasi Per-Uuan
33	KOTA PROBOLINGGO	UNGGUL SUGIARTO	19780821 200811 1 001 19750821 200811 1 001	Protokol
34	KOTA PASURUAN	IMA NUR SOIBAH	19800327 200811 2 001	Protokol
35	KOTA MOJOKERTO	DIKRILIA A RIZKI ERTIKA A, SE	19861210 200912 2 003	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan
36	KOTA MADIUN	DWI ARIFianto, SH	19810214 201012 1 002	Penyusun Bahan Informasi Per-Uuan
37	KOTA SURABAYA	WARTIKA CANNDRA DEWI, SE	19730814 200701 2 002	
38	KOTA BATU	EKO ISWAHYUDI	19740930 201407 1 001	Pramu Pustaka
39	PROVINSI JAWA TIMUR	DIAN TRIA RAHAYU, ST	19850804 201012 2 003	Penyusun Laporan Akuntabilitas
40	PROVINSI JAWA TIMUR	ANDHIKA, SE	19840826 200912 2 003	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemflu

Tabel 3.20
DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT MANAJEMEN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

NO	KPU KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	JABATAN	
1	2	3	4	5	
1	PACITAN	TONI CAHYO NUGROHO	19830611 200701 1010	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1
2	PONOROGO	NUR IMANAH	19820427 200701 2 002	Staf Pengelola Keuangan	
3	TRENGGALEK	MINUK WIJAYANTI	19820428 200910 2 001	Pembuat Daftar Gaji	3
4	TULUNGAGUNG	RONY YULIANTO	19800726 200811 1 001	Protokol	
5	BLITAR	DESHINTA CHRISTY AMELIA, S.Ip UNIK MAYORIYAN, SE	19820327 200912 2 002	Bendahara Pengeluaran	5
6	KEDIRI	IKA RAHMASARI	19781005 200701 2 002	Pemroses Mutasi Pegawai	
7	MALANG	ISNAWAN ARDIANYAH, ST	19820831 201012 1 002	Penyusunan Norma , Design dan Standart Kebutuhan Pemilu	7
8	LUMAJANG	BUDIONO, SH	19820110 200811 1 001	Penyusunan Bahan Evaluasi dan Pelaporan	9
9	JEMBER	YUNIARTO BANI SYAHRIADI, SH	19820610 200902 1 011	Penelaah Pengelola Keuangan	
10	BANYUWANGI	DWI RATNA ANJARSAKTI, SE	19850716 201012 2 002		
11	BONDOWOSO	ADIETS NURHASANAH, SP	19830510 200902 2 008	Penyusunan Laporan Keuangan	1
12	SITUBONDO	MIUJIBURRAHMAN	19841126 200701 1 002	Pembuat Daftar Gaji	
13	PROBOLINGGO	EFI ANITA OKTAFIA, A.Md	19861011 201012 2007 19861011 2010 2 2007	Verifikator Keuangan	
14	PASURUAN	SULISTIANAH	19770511 200701 2 002	Verifikator Keuangan	
15	SIDOARJO	RAHMA TINOVA, SE	19801125 201012 2 001	Penyusunan Laporan Keuangan	
16	MOJOKERTO	WIHADI SANDAJA	19800129 200604 1 006	Verifikator Keuangan	

ANANG SUMIKTI, S.Pd. 19781214

2014071 002

Pengawasan Bahan
Informasi &
Pencatatan

NO	KPU KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	JABATAN	
1	2	3	4	5	
17	JOMBANG	FITRI MAHARANI YUDHITA	19790820 201012 2 001	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	1
18	NGANJUK	ANANG ASY'ARI	19750119 201407 1 001	Pramu Acara	
19	MADIUN	INDAH PURWATI, SE	19760706 200912 2 002	Bendahara	1
20	MAGETAN	MARSIYAH, SE	19810919 200501 2 010	Penyusun Laporan Keuangan	
21	NGAWI	RIMA ARISTANTIN	19850624 200901 2 003	Pembuat Daftar Gaji	2
22	BOJONEGORO	TEGUH SETIYO UTOMO	19780620 200701 1 005	Koordinator Pengamanan	
23	TUBAN	WARNO	19730818 200701 1 002	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2
24	LAMONGAN	IWAN TRI PRASETIYO, SE	19850214 201012 1 003	Penyusun Laporan Keuangan	
25	GRESIK	SUKANDAR SUYANTO	19820414 200701 1 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2
26	BANGKALAN	SIDIK, SE	19671207 200701 1 020	Bendahara Pengeluaran	
27	SAMPANG	ENDRA YUSUF, A.Md	19820502 200902 1 008	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	2
28	PAMEKASAN	HARI MULYONO	19761203 200701 1 004	Bendahara Pengeluaran	
29	SUMENEP	SALEH, SH	19750701 200701 1 003	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
30	KOTA KEDIRI	OKTAFRIDA INSANI, S.Sos	19851029 200811 2 001	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang undangan	
31	KOTA BLITAR	GELAR AGUNG PURNOMO	19870109 200902 1 004	BENDAHARA	
32	KOTA MALANG	AYU JAYA TIUR NAULI SIMATUPANG, S.Sos	19850115 200912 2 001	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	
33	KOTA PROBOLINGGO	AMAM FATHONI	19831103 201407 1 002	Notulensi	3
34	KOTA PASURUAN	IMA NUR SHOHIBAH	19800327 200811 2 001	Protokoler	
35	KOTA MOJOKERTO	SUMARJI, SE	19600721 199803 1 006	Bendahara Pengeluaran	3
36	KOTA MADIUN	KRISTINE CATUR TRI SAPTANINGRUM	19780627 200811 2 001	Pemroses Mutasi Pegawai	
37	KOTA SURABAYA	ENDAH YULI EKOWATI, ST	19800717 201012 2 003		3
38	KOTA BATU	DONY INDRAJAYA, A.Md	19831212 200902 1 005	Pengadiministrasi Umum	
39	PROVINSI JAWA TIMUR	SINTA CITRA CAHYANI, A.Md	19840418 200902 2 006	Bendahara Pengeluaran	3
40	PROVINSI JAWA TIMUR	ILMA FAUZIAH, A.Md	19920927 201502 2 002	Staf Pengelola Keuangan	

Tabel 3.21
DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SDM (OUTBOND) DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	EKO SASMITO, SH., MH	KETUA
2	GOGOT CAHYO BASKORO, S.Sos	ANGGOTA
3	DEWITA HAYU SINTA S.P., M.SI	ANGGOTA
4	MUHAMMAD ARBAYANTO, SH., MH	ANGGOTA
5	CHOIRUL ANAM, S. Pd	ANGGOTA
6	HM. E. KAWIMA, SH., Msi	SEKRETARIS
7	Drs.Ec.ARIS GATOT SUBAGYO	KABAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK
8	Drs. AKHMAD SUDJONO, MM	KABAG PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM
9	SLAMET SETIDJOAJI,SH	KABAG HUKUM, TENIS, DAN HUPMAS
10	ANTON YULIONO, SH	KASUBBAG HUKUM
11	NUGRAHANDINI RPA, SH	KASUBBAG ORGANISASI & SDM
12	SUWANDI, S.Sos, M.Si	KASUBBAG PROGRAM & DATA
13	AZIS BASUKI, SE	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS
14	YULYANI DEWI, ST	KASUBBAG KEUANGAN
15	RENDY HARDIJANTO, SE, M.AK	STAF HUKUM
16	UMAR FAUZI	STAF TEKNIS & HUPMAS
17	AGUS NUGROHO,SE	KASUBBAG UMUM & LOGISTIK
18	AGUS ERWANTO	STAF TEKNIS & HUPMAS
19	WIRATMOKO, IS, SIP	STAF TEKNIS & HUPMAS
20	SULAIMAN, S.Sos	STAF HUKUM
21	EUIS SESTIARINI, ST	STAF KEUANGAN
22	ULFA LAILY, SE	STAF ORGANISASI & SDM
23	DWI JATI NUR AENI, SE	STAF HUKUM
24	DINA LESTARI, S.IP	STAF TEKNIS & HUPMAS
25	ANDHIKA, SE	STAF UMUM & LOGISTIK
26	M. NASRULLOH. A, SH	STAF HUKUM

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
27	PRADINI CITRA AMALIA	STAF PROGRAM & DATA
28	SATRIYO WIDODO, S.IP	STAF HUKUM
29	DIAN TRIA RAHAYU, ST	STAF PROGRAM & DATA
30	ENDRAS P KUSUMASMORO, SE	STAF KEUANGAN
31	HARI W. PRASODJO, A.Md.	STAF KEUANGAN
32	DWI S HARTOKUMORO Amd.Par	STAF HUKUM
33	SINTA CITRA CAHYANI, A.Md	STAF KEUANGAN
34	ACH. SUHARI	STAF PROGRAM & DATA
35	ADE AGUNG	STAF ORGANISASI & SDM
36	AGUSTIN WIJAYANTI	STAF PROGRAM & DATA
37	DARMAJI	STAF ORGANISASI & SDM
38	ARIF SENTIAWAN	STAF TEKNIS & HUPMAS
39	SEKTIONO	STAF TEKNIS & HUPMAS
40	ANITA ROSANTI	STAF UMUM & LOGISTIK
41	AIRIOKO	TAF UMUM & LOGISTIK
42	DEDIT SETIAWAN	STAF TEKNIS & HUPMAS
43	DWI PRANOTO	STAF UMUM & LOGISTIK
44	MAHFUD	STAF UMUM & LOGISTIK
45	ANDI PURNOMO	STAF UMUM & LOGISTIK
46	BUDIARTO	STAF UMUM & LOGISTIK
47	IMAM WAHYUDI, S.Sos	STAF ORGANISASI & SDM
48	ILMA FAUZIAH, A.Md	STAF KEUANGAN
49	DENNY SETIYADI, SE	ADMINISTRASI (KEUANGAN)
50	ZEIN ARIEF SANDHI, SE	ADMINISTRASI (KEUANGAN)
51	MOCHAMAD ISWANTO	PRAMUSAJI
52	MOCH. ANIF	SATPAM
53	BAMBANG SUIS TRIATMOJO	SATPAM
54	CAHYO BIMO KARTIKO	SATPAM
55	HARI ARDIANTO PRIAMBODO	SATPAM
56	SURACHMAN	SATPAM
57	RAZAKI ZAKARIYA	SATPAM
58	NASRUDDIN MACHTUM	SOPIR

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
59	RIBUT HARIONO	SOPIR
60	ACHMAD CHOIRUL ANAM	SOPIR
61	ABDUL HALIM	STAFF KOMISIONER
62	DIAN EKA NOVITA	STAFF KOMISIONER

3. Indikator kinerja Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan melalui output kegiatan layanan pengadaan pegawai baru merupakan salah satu alat untuk mencapai kinerja sasaran ini. Target yang ditetapkan sebanyak 1 orang dengan bobot 90 %.

Output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 32.162.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 7.736.000 atau sekitar 24,05 %.

Rendahnya realisasi ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa untuk tahun 2015 tidak ada proses pengadaan pegawai baru. Namun demikian di tahun 2015, KPU Provinsi Jawa Timur mendapatkan tambahan formasi untuk 3 (tiga) orang CPNS organic, lihat tabel 3.22. di bawah ini :

TABEL 3.22
NAMA TAMBAHAN FORMASI CPNS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Lulusan	TMT CPNS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
1	IMAM WAHYUDI, S.Sos	19830225 201502 1 001	III/a	S-1	Feb 2015
2	CHOIRUL ANWAR, S.Kom	19920927 201502 1 001	III/a	S-1	Feb 2015
3	ILMA FAUZIAH, A.Md	19870512 201502 2 002	II/a	D-3	Feb 2015

Dari tabel di atas, maka capaian kinerja yang direalisasikan adalah sebesar 3 (tiga) orang atau 270 %.

Sedangkan ditingkat Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota untuk tahun 2015 tidak ada penambahan formasi pegawai.

4. Penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan output kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Daerah Pemekaran. Target sasaran yang dicapai adalah sebesar 5 orang dengan bobot sekitar 90 %.

Untuk mendukung output kegiatan ini, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.850.000 dan selama tahun berjalan terserap Rp. 0 atau 0 %, termasuk dalam realisasi capaian kinerjanya juga tidak mengalami perubahan.

Hal ini dikarenakan bahwa selama tahun 2015, tidak ada seorangpun dari Anggota Komisioner dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Dari catatan, KPU Provinsi Jawa Timur, ada seorang Komisioner KPU Kabupaten Sampang (Abdul Azis Agus Priyanto, ST) yang telah dipecat oleh DKPP RI Nomor : 316/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 11 November 2014 dan di SK Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 171/Kpts/KPU-Prov-014/XII/2014 tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014, tetapi melakukan upaya hukum di PTUN Surabaya, sampai saat ini masih dalam upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan nomor perkara : 08/G/2015/PTUN.SBY.

5. Output dokumen kepegawaian, dengan indikator kinerja jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan.

Tingkat keakuratan data dan informasi SDM, telah dilaksanakan dengan mengisi Data Base Kepegawaian KPU RI dimana data pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur sebanyak 702 (Tujuh Ratus Dua) Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di 38 Kabupaten/kota Se-Jawa Timur dan 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Komisioner di 38 Kabupaten/Kota, tabel 3.23 di bawah.

TABEL 3.23
JUMLAH PEJABAT DAN SEKRETARIAT TAHUN 2015
KPU PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA SE-JAWA TIMUR

No.	KPU Kabupaten/ kota	Jumlah Tenaga			Total PNS & Tenaga Kontrak
		Komisioner	PNS	Tenaga Kontrak	
1	Provinsi Jawa Timur	5	45	14	59
2	Kabupaten Pacitan	5	18	7	27
3	Kabupaten Ponorogo	5	11	7	28
4	Kabupaten Trenggalek	5	16	5	21
5	Kabupaten Tulungagung	5	21	11	33
6	Kabupaten Blitar	5	14	7	22
7	Kabupaten Kediri	5	14	6	21
8	Kabupaten Malang	5	12	8	19
9	Kabupaten Lumajang	5	4	9	27
10	Kabupaten Jember	5	18	7	23
11	Kabupaten Banyuwangi	5	27	9	27
12	Kabupaten Bondowoso	5	22	6	25
13	Kabupaten Situbondo	5	18	9	28
14	Kabupaten Probolinggo	5	22	8	27
15	Kabupaten Pasuruan	5	16	5	21
16	Kabupaten Sidoarjo	5	17	5	25
17	Kabupaten Mojokerto	5	31	8	33
18	Kabupaten Jombang	5	22	9	29
19	Kabupaten Nganjuk	5	14	7	21
20	Kabupaten Madiun	5	18	5	23
21	Kabupaten Magetan	5	20	6	26
22	Kabupaten Ngawi	5	21	5	28
23	Kabupaten Bojonegoro	5	17	7	22
24	Kabupaten Tuban	5	12	12	25
25	Kabupaten Lamongan	5	20	6	25
26	Kabupaten Gresik	5	18	6	25
27	Kabupaten Bangkalan	5	35	5	38
28	Kabupaten Sampang	5	17	12	28
29	Kabupaten Pamekasan	5	19	7	23
30	Kabupaten Sumenep	5	9	8	17
31	Kota Kediri	5	15	6	21
32	Kota Blitar	5	5	14	23
33	Kota Malang	5	16	7	22
34	Kota Probolinggo	5	18	8	25
35	Kota Pasuruan	5	20	5	21
36	Kota Mojokerto	5	18	7	18
37	Kota Madiun	5	15	8	24
38	Kota Surabaya	5	24	5	30
39	Kota Batu	5	24	6	32
Jumlah		195	720	292	1.207

Sasaran 5	:	Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari Untuk KPU Seluruh Indonesia
------------------	----------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di lingkungan KPU Seluruh Indonesia. Sasaran ini dicapai melalui output kegiatan penatausahaan barang milik negara, evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN, sosialisasi elektronika system kearsipan, penataan, pendataan dan penilaian arsip, serta layanan perkantoran, lihat tabel 3.24, di bawah ini.

Tabel 3.24
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari Untuk KPU Seluruh Indonesia

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.	3 Dokumen 90 %	3 Dokumen	90
Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	3 Laporan 100%	3 Laporan	100
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Trampil dalam rangka Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	2 Orang 100 %	2 orang	100
Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	1 Laporan 100%	1 Laporan	100
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	12 Layanan Bulan 100%	12 Layanan Bulan	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat, ditargetkan sebesar 3 (tiga) dokumen dengan bobot 90 %, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 95.913.000.

Realisasi kinerja yang dicapai dari output kegiatan ini adalah sebanyak 3 (tiga) dokumen dengan bobot 90 %, sedangkan untuk realisasi anggaran yang diserap dalam output kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.845.000 atau 20,69 %.

Output kegiatan ini dipergunakan untuk pembinaan dan melakukan koordinasi dan konsultasi penatausahaan barang milik negara dan penghapusan barang milik negara ke pemerintah pusat. Tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan barang milik negara
 - b. Pelatihan sistem informasi manajemen barang milik negara
 - c. Pengelolaan laporan SIMAK BMN
 - d. Penghapusan barang milik negara
2. Sasaran program/kegiatan dengan indicator tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut, dicapai melalui output kegiatan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN dukungan pelayanan administrasi kegiatan memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100 % dengan 3 (tiga) laporan.
 3. Kegiatan yang berkaitan dengan dukungan pelayanan administrasi adalah:

Penyelenggaraan Tata Kelola dan Kearsipan Provinsi

Konsultasi mengikuti rapat koordinasi/BIMTEK yang diselenggarakan KPU Pusat

Konsultasi terhadap tindak lanjut temuan pemeriksaan selama tahun 2015

Output kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.467.000, sampai akhir tahun alokasi anggaran ini belum terserap.

4. Indikator kinerja terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Trampil dalam rangka Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU dengan target 2 (dua) orang dengan bobot 100 % merupakan alat untuk mencapai target kinerja sasaran kelima ini.
5. Output kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 19.556.000 dan selama tahun 2015 anggaran output kegiatan belum terealisasi seperti yang ditargetkan, sehingga penyerapannya mencapai 0 %. Sedangkan untuk capaian kinerja, KPU Provinsi Jawa Timur telah mencapai target yang ditetapkan dengan mengirimkan 2 (dua) orang pegawai untuk mengikuti Sosialisasi Sistem Aplikasi Elektronika Kearsipan SIKD di lingkungan KPU ke Jakarta tanggal 30 September s/d 2 Oktober 2015 (Surat Setjen Nomor 1225/SJ/IX/2015 tanggal 9 September 2015).
6. Kedua orang pegawai tersebut adalah Agus Nugroho, ST (Kasubag Umum dan Logistik) dan Andi Purnomo (Staf Kearsipan pada Subag Umum dan Logistik, KPU Provinsi Jawa Timur).
7. Sasaran yang dicapai dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU dicapai melalui output kegiatan penataan, pendataan dan penilaian arsip menargetkan 1 (satu) laporan dengan bobot 100 %. Untuk mendukung capaian kinerja, Output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 56.760.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 55.170.000 atau sekitar 97,20 %. Selain dipergunakan untuk penata kelola kearsipan, output kegiatan ini juga diperuntukan untuk belanja modal peralatan dan mesin, sebagaimana SPK Nomor 01/SPK-PBJ/IV/2015, tertanggal 1 April 2015 dan SPK Nomor 03/SPK-PBJ/IV/2015, tertanggal 9 April 2015, sehingga capaian kinerja yang direalisasikan mencapai 1 (satu) laporan dengan bobot 100 %.

8. Satuan Kinerja KPU Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran (berupa : ATK, langganan koran/majalah/alat rumah tangga, dll), melakukan perawatan gedung, perawatan halaman, perawatan 6 unit kendaraan roda 4, perawatan 7 unit kendaraan roda 2, perawatan sarana gedung, pembayaran listrik, air, telepon, pengiriman surat-surat dinas, pembayaran honor satpam/sopir/pramusaji, pembayaran honor pelaksana kegiatan dan pengadaan pakaian dinas PNS untuk 44 PNS dan 12 orang pegawai tidak tetap meliputi satpam/pramusaji/sopir. Output kegiatan layanan perkantoran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.276.800.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.056.521.434,- atau sekitar 82,75 %.
9. Capaian kinerja yang ditargetkan sebanyak 12 layanan bulan dengan bobot 100 % dan sampai akhir tahun capaian kinerja tersebut terealisasi sekitar 12 layanan bulan dengan bobot 100 %.
10. Realisasi output kegiatan ini tertuang dalam SPK Nomor 04/SPK-PBJ/IV/2015, tertanggal 20 April 2015,

Sasaran 6	:	Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel
------------------	----------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel di lingkungan KPU, dengan menyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang diterbitkan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan baik dari sisi prosedur dan kebijakan, selain itu suatu keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Sasaran yang indicator kinerjanya Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP ini dicapai melalui output kegiatan pemeriksaan di lingkungan Sekretarat KPU Provinsi Jawa Timur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.034.000 untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) laporan dengan bobot sekitar 100 %.

Realisasi output kegiatan mencapai Rp. 222.341.440 atau sekitar 63,88 % dan capaian kinerja terealisasi sebanyak 1 (satu) laporan dengan bobot 100 %. Output kegiatan ini dipergunakan untuk koordinasi dalam penyusunan laporan hasil review keuangan di lingkungan KPU secara berkala (SPK Nomor : 05/SPK-PBJ/IV/2015, tertanggal 20 April 2015), lihat tabel 3.25. di bawah ini.

Tabel 3.25
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya
Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1 Laporan 100%	1 Laporan	100

Sasaran 7	:	Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya
------------------	----------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan persiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhan. Output kegiatnnya adalah Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dimana indikator kinerjanya dapat dilihat di tabel 3.26, di bawah ini.

Dari gambaran tabel 3.26, dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa :

1. Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Sasaran ini akan dicapai melalui Output kegiatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum dengan target 5 kasus – 90 %, target dari sasaran tersebut terselesaikannya 5 kasus sengketa kepemiluan dalam tahun 2015, yang merupakan kelanjutan proses sengketa hokum tahun 2014.

Tabel 3.26
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaraanya
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi
Hukum dan Penyuluhannya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	5 Kasus 90%	3 kasus	54
Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan 85%	1 laporan	85
Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1 Provinsi 90%	1 Provinsi 18 Kab/Kota	90

Dalam tahun 2014, ada beberapa kasus sengketa hokum yang melibatkan KPU Provinsi Jawa Timur dan sebagian KPU kabupaten/Kota sebagai tergugat, dari proses persidangan ada 2 sengketa hokum yang telah diputuskan pengadilan yaitu Kasus Timsel Probolinggo dan Timsel Gresik. Sisanya berlanjut di tahun 2015, oleh sebab itu masih ada sengketa hokum yang belum diputuskan dan masih melakukan proses hokum sampai ke tingkat yang lebih tinggi (banding dan kasasi), diantaranya : Kasus Timsel KPU Kabupaten Kediri, Kasus Timsel KPU Kabupaten Blitar, dan kasus pemberhentian Komisioner KPU Kabupaten Sampang (Abdul Aziz Prayitno), Kota Malang, Kota Blitar, Kota Probolinggo, serta persiapan Perselisihan Hasil Pilkada serentak 2015 sebanyak 6 daerah (Gresik, Sumenep, Ponorogo, Malang, Situbondo dan Jember).

Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah 2 kasus dari target 5 kasus, sehingga capaian kinerja 36 %.

Output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 125.958.000 yang diperuntukkan belanja transport ke pengadilan, perjalanan ke daerah, koordinasi ke pemerintah pusat dan pembiayaan administrasi pengadilan, dengan terealisasi sebesar Rp. 77.510.700 atau 61,54 %.

2. Sasaran ini dengan indicator Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, targetnya adalah 1 (satu) laporan – bobot 85 %, dicapai dengan output kegiatan layanan administrasi kepemiluan, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 dengan dipergunakan untuk koordinasi dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan. Disamping itu dipergunakan untuk pengelolaan dokumen dan informasi hukum, terserap sebesar Rp. 2.498.500 atau sekitar 27,76 %.

Dari target capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015, capaian kinerja telah terealisasi berupa 1 (satu) laporan atau sekitar 85 %.

3. Sasaran ini dengan indicator jumlah KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan tahapan pemilu, menargetkan 1 Provinsi dengan bobot 90 %.

Capaian kinerja akan dicapai dengan output kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.788.000, dan dimana terserap sebesar Rp. 79.455.320 atau 71,72 %.

Tahun 2015 merupakan tahun penyelenggaraan pilkada serentak, dimana sebanyak 18 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Output kegiatan penyuluhan perundang-undangan dengan melibatkan 18 Kabupaten/Kota dilakukan KPU Provinsi secara berkala dan massif untuk keberhasilan pilkada serentak.

Realisasi capaian kinerja dapat tercapai untuk 1 Provinsi dan 18 Kabupaten/Kota dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Provinsi – 90 %. Selain itu, KPU Provinsi Jawa Timur menghadiri rapat kerja di KPU RI dalam rangka penyuluhan Peraturan tersebut.

Sasaran 8	:	Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
------------------	----------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Adapun output kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas, lihat tabel 3.27, di bawah.

Tabel 3.27
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terselenggaranya
Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat	50 Orang 100 %	4 orang	10
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	1 Satker 100%	39 Satker (1 Provinsi dan 38 Kab/Kota)	100
Jumlah pusat pendidikan pemilih	1 Satker 100%	1 Satker	100
% Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan 75%	3 Laporan	225,5
Jumlah kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan	5 laporan	500

Dari gambaran tabel 3.27, di atas, dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa :

- a) Output Kegiatan proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menargetkan sebanyak 50 Orang atau sekitar 100 %.
- Target yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja Penggantian antar waktu anggota legislative tidak dapat terealisasi, walaupun bersamaan dengan pilkada serentak tahun 2015. Target tersebut merupakan antisipasi terhadap banyaknya anggota dewan yang akan maju sebagai calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, maupun penggantian atas kebijakan partai politik.
 - Dalam pilkada serentak tahun 2015, hanya beberapa orang anggota dewan yang ikut meramaikan bursa, diantaranya :
 - 1) Kartika Hidayati (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Lamongan ;
 - 2) Soegiri Sancoko (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur) yang mencalonkan diri menjadi Bupati Ponorogo ;
 - 3) Nur Ahmad Syaifuddin. (Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo) yang mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Sidoarjo ;
 - 4) Abdul Kholik (Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo) yang mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Sidoarjo.
 - 5) Sebagaimana anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menalonkan diri sebagai Kepala daerah maupun Wakil Kepala Daerah.
 - Output kegiatan ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.878.000 dan diserap sebesar Rp. 65.511.300 atau sekitar 81 %, yang diperuntukan belanja perjalanan dinas biasa, perjalanan koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW.
 - Sedangkan dari realisasi capai kinerja 10 % atau hanya 4 orang anggota legislative yang dilakukan PAW dari 50 orang.
- b) Sasaran kegiatan dengan Indicator kinerja jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dicapai melalui output kegiatan pembentukan PPID, dengan target 1 (satu) Satker – 100 %.

Selama tahun 2015, selain KPU Provinsi Jawa Timur yang sudah membentuk PPID, sudah ada 33 (tiga puluh) satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur yang telah membentuk PPID.

Dalam mendukung kinerja kegiatan PPID di Satker KPU Provinsi Jawa Timur, diupayakan untuk melengkapi fasilitas berupa 1 (satu) unit computer dan printer, sebagaimana dokumen SPK Nomor 02/SPK-PBJ/IV/2015 tanggal 2 April 2015.

Pada tahun 2015, Output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 91.905.000 dan terserap sebesar Rp. 66.723.900 atau 72,60 %. Sedangkan untuk capaian kinerja dari target 1 (satu) satker, telah terealisasi menjadi 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan 1 (satu) laporan kinerja, sehingga tercapai 200 %.

- c) Indikator kinerja jumlah pusat pendidikan pemilih, dengan target 1 (Satu) Satker dan bobot 100%, melalui output kegiatan pusat pendidikan pemilih merupakan cara untuk merealisasi capaian kinerja sasaran ini.

Output kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 36.191.000 dan terserap sebesar Rp. 23.684.500 atau 65,44 %. Sedangkan untuk capaian kinerja terealisasi sebanyak 1 (satu) satker dengan bobot 100 %.

Output kegiatan pendidikan pemilih difokuskan untuk memberikan fasilitasi pendidikan pemilih untuk segmen perempuan/disabilitas/civil society/relawan demokrasi serta penggalangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi.

- d) Sasaran kegiatan dengan indikator kinerja Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada dicapai melalui output kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada, selama tahun 2015 menargetkan 1 (satu) laporan - 75%.

Dalam tahun 2015, Output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 252.885.000 dan dapat terserap sebesar Rp. 191.425.726 atau 75,70 % yang diperuntukan pelayanan pers dan media, media center, pengembangan kehumasan, penerbitan

jurnal suara KPU, serta pengelolaan dan pengembangan website KPU Provinsi.

Kegiatan rutin dari pelayanan pers dan media, serta pengembangan kehumasan adalah melakukan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dengan KPU RI di Jakarta.

Untuk penerbitan jurnal KPU, dalam tahun 2015 baru dapat menerbitkan 4 (empat) edisi.

Untuk pengembangan website, diperuntukkan untuk pemberian materi / bimbingan teknis bagi staf KPU Provinsi Jawa Timur, agar memahami dan dapat menulis berita online di website.

Dari gambaran di atas, realisasi capaian kinerja untuk sasaran kegiatan ini telah melampaui target sebanyak 3 (tiga) laporan atau sekitar 225,5 %.

- e) Jumlah kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Output kegiatan ini adalah supervise dan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak tahun 2015, yang sesuai dengan tahapan pilkada.

Target indicator dari capai kinerja sebanyak 1 (satu) laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 833.752.000 dan sudah terserap sebesar Rp. 662.290.800 atau sekitar 79,43 %.

Realisasi yang dicapai dari output kegiatan ini antara lain : kegiatan rapat konsultasi dan koordinasi/bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan supervise, monitoring dan evaluasi tahapan pilkada serentak 2015 tersebar diberbagai Kabupaten/Kota.

Kegiatan-kegiatan dilaksanakan di KPU Kota Pasuruan, KPU Jombang, KPU Kab. Kediri, KPU Tuban, KPU Sumenep yang masing-masing memberikan 1 (satu) dokumen pelaporan kegiatan.

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa target 1 (satu) laporan dapat dicapai sebanyak 5 (lima) laporan kegiatan atau sekitar 500 %.

C. Akuntabilitas Keuangan

Mengawali pelaksanaan kinerja tahun 2015, KPU Provinsi Jawa Timur mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.5.741.770.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), sejalan dengan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2015, KPU memberikan tambahan pagu anggaran sebesar Rp.1.631.842.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Sehingga alokasi anggaran yang dikelola KPU NProvinsi Jawa Timur bertambah menjadi Rp. 7.373.712.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Pada triwulan ketiga tahun 2015, seiring dengan diberlakukannya Tunjangan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU, maka KPU Provinsi Jawa Timur mendapatkan tambahan alokasi dana sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah), sehingga anggaran yang dikelola KPU provinsi Jawa Timur menjadi Rp. 30.228.927.000,00 (Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Sampai akhir tahun anggaran 2015, dari pagu anggaran yang alokasikan sebesar Rp. 30.228.927,00 tingkat pencapaian realiasi anggaran adalah sebesar 94,80 % atau ekuivalen sebesar Rp. 28.597.899.675,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.631.027.325,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sangat sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh bagian dan komitmen bersama sepanjang tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU provinsi Jawa Timur tahun 2015 ini dapat dilihat pada tabel 3.28 :.

Tabel 3.28
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

No.	Program/Kegiatan /Output	Pagu Anggaran	TARGET	REALISASI	SISA (KURANG/ LEBIH)	CAPAI AN (%)
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	28,687,570,000	28,687,570,000	27,428,798,929	1,258,771,071	95.61
1	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	25,868,966,000	25,868,966,000	25,312,324,015	556,641,985	97.85
	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	92,992,000	92,992,000	85,148,970	7,843,030	91.57
	Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	47,704,000	47,704,000	43,961,300	3,742,700	92.15
	Pengelolaan Hibah Pemilihan (Laporan)	379,466,000	379,466,000	308,637,000	70,829,000	81.33
	Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	25,348,804,000	25,348,804,000	24,874,576,745	474,227,255	98.13
2	Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	107,987,000	107,987,000	81,673,850	26,313,150	75.63
	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik PEMILU (dokumen).	107,987,000	107,987,000	81,673,850	26,313,150	75.63
3	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	375,486,000	375,486,000	265,224,390	110,261,610	70.63
	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	160,662,000	160,662,000	116,815,040	43,846,960	72.71
	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (Dokumen)	158,972,000	158,972,000	120,912,150	38,059,850	76.06
	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU	55,852,000	55,852,000	27,497,200	28,354,800	49.23

No.	Program/Kegiatan /Output	Pagu Anggaran	TARGET	REALISASI	SISA (KURANG/ LEBIH)	CAPAI AN (%)
4	Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	533,601,000	533,601,000	415,698,800	117,902,200	77.90
	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	166,877,000	166,877,000	122,807,800	44,069,200	73.59
	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	306,062,000	306,062,000	270,060,000	36,002,000	88.24
	Layanan Pengadaan Pegawai Baru	32,162,000	32,162,000	7,736,000	24,426,000	24.05
	PAW ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KAB/KOTA	4,850,000	4,850,000	-	4,850,000	-
	Dokumen Kepegawaian	23,650,000	23,650,000	15,095,000	8,555,000	63.83
5	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	1,453,496,000	1,453,496,000	1,131,536,434	321,959,566	77.85
	Penataan Barang Milik Negara	95,913,000	95,913,000	19,845,000	76,068,000	20.69
	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN	4,467,000	4,467,000	-	4,467,000	-
	Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan	19,556,000	19,556,000	-	19,556,000	-
	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	56,760,000	56,760,000	55,170,000	1,590,000	97.20
	Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)	1,276,800,000	1,276,800,000	1,056,521,434	220,278,566	82.75
6	Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	348,034,000	348,034,000	222,341,440	125,692,560	63.88
	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	348,034,000	348,034,000	222,341,440	125,692,560	63.88
II.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1,541,357,000	1,541,357,000	1,169,100,746	372,256,254	75.85

No.	Program/Kegiatan /Output	Pagu Anggaran	TARGET	REALISASI	SISA (KURANG/ LEBIH)	CAPAI AN (%)
7	Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	245,746,000	245,746,000	159,464,520	86,281,480	64.89
	Advokasi dan sengketa hukum (kasus)	125,958,000	125,958,000	77,510,700	48,447,300	61.54
	Layanan Administrasi Kepemiluan (laporan)	9,000,000	9,000,000	2,498,500	6,501,500	27.76
	Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (Provinsi)	110,788,000	110,788,000	79,455,320	31,332,680	71.72
8	Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1,295,611,000	1,295,611,000	1,009,636,226	285,974,774	77.93
	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (orang)	80,878,000	80,878,000	65,511,300	15,366,700	81.00
	Pembentukan PPID (Satker)	91,905,000	91,905,000	66,723,900	25,181,100	72.60
	Pusat Pendidikan Pemilih (Satker)	36,191,000	36,191,000	23,684,500	12,506,500	65.44
	Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (laporan)	252,885,000	252,885,000	191,425,726	61,459,274	75.70
	Tahapan Pemilihan (Laporan)	833,752,000	833,752,000	662,290,800	171,461,200	79.43
	JUMLAH	30,228,927,000	30,228,927,000	28,597,899,675	1,631,027,325	94.60

Tahun 2015 merupakan tahun pemilu, karena sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak, yaitu : Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan,

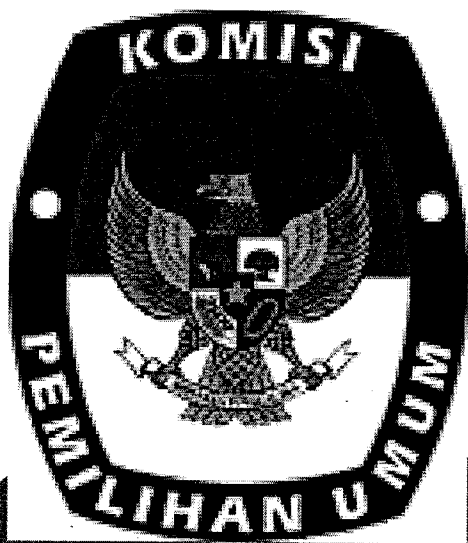
Tuban, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Sumenep, Sidoarjo, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Malang, Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi dan Pacitan. Dimana dalam pilkada, dilakukan tahapan-tahapan antara lain : pemutakhiran data pemilih,

Selain terfokus kepada menyukkseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015, melalui koordinasi, supervise, monitoring, dan evaluasi dengan Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Jawa Timur juga tetap melaksanakan kegiatan rutin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 dengan sangat selektif, efektif dan efisien, karena mulai tahun 2015 untuk mendorong peningkatan kinerja Instansi, Pemerintah telah memberikan dan memberlakukan Tunjangan Kinerja kepada semua Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur .

Dari gambaran tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh Anggaran DIPA KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 telah terserap, kecuali untuk sub output sebagai berikut:

- a. Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (3358.005);
- b. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN (3360.010)
- c. Sosialisasi Elektronika Sistem Kearsipan (3360.014)

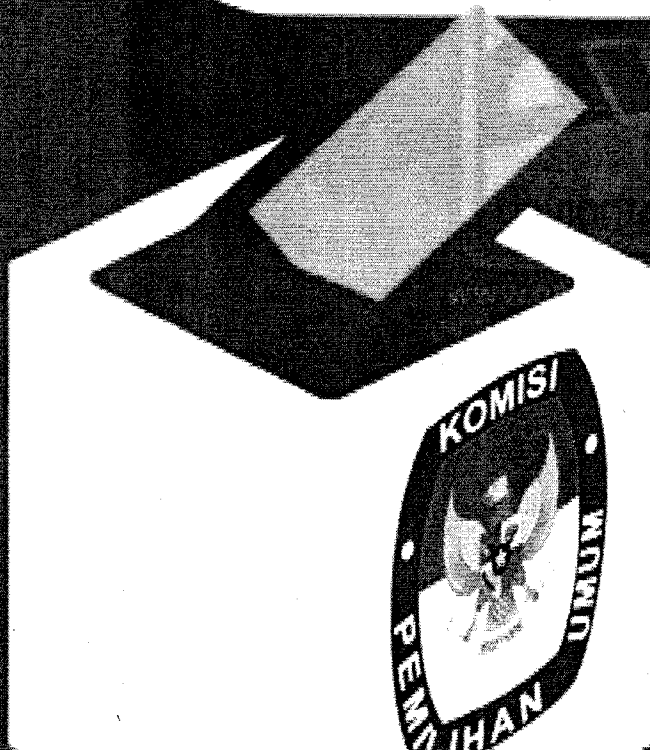
Selain itu, ada beberapa kegiatan, output dan sub output yang pelaksanaannya belum optimal dan maksimal, sehingga penyerapannya di bawah 50 %. Penyebabnya antara lain : adanya kebijakan dari pemerintah untuk tidak ada pengadaan pegawai baru dan kebijakan lainnya yang belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU.



BAB IV

PENUTUP

satu
suara
untuk bangsa



Sebagai insan muda penerus bangsa,
kita juga punya hak untuk bersuara.
Ayo, gunakan satu suara kita sebaik
mungkin untuk Indonesia tercinta.

Ditujukan
Februari 2016

KPU PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Tenggilis No. 1 – 3 Surabaya
Telp. 031 – 8484825, 27, 28
Fax. 031 – 8484826

BAB IV

P E N U T U P

LAKIP KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Pusat dan Renstra KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2015. Karena KPU Provinsi merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2015. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2015, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparaturnya negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Dalam tahun 2015, KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Memuaskan*.

Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 30.228.927.000,00, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 28.597.899.675,00 atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 94,60 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur, kondisi anggaran adalah silpa Rp. 1.617.622.325,00.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur kedepan, antara lain :

- 1) Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- 3) Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
- 4) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;
- 5) Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;
- 6) Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting

sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;

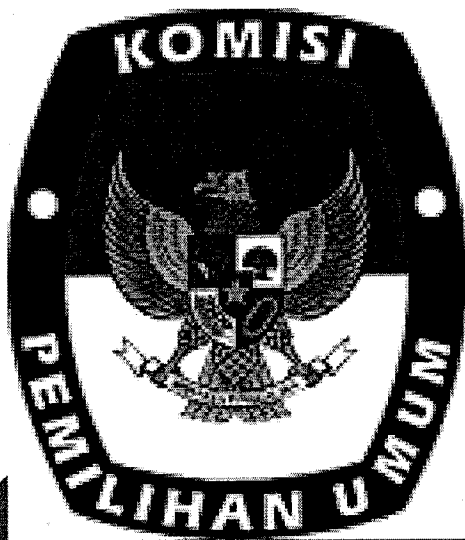
- 7) Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
- 8) Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur.
- 9) Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Provinsi Jawa Timur dan Satuan Kerja Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - a) Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur kepada *stakeholders*
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan
 - c) Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran
Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran
3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan *workshop*/sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis.
4. Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

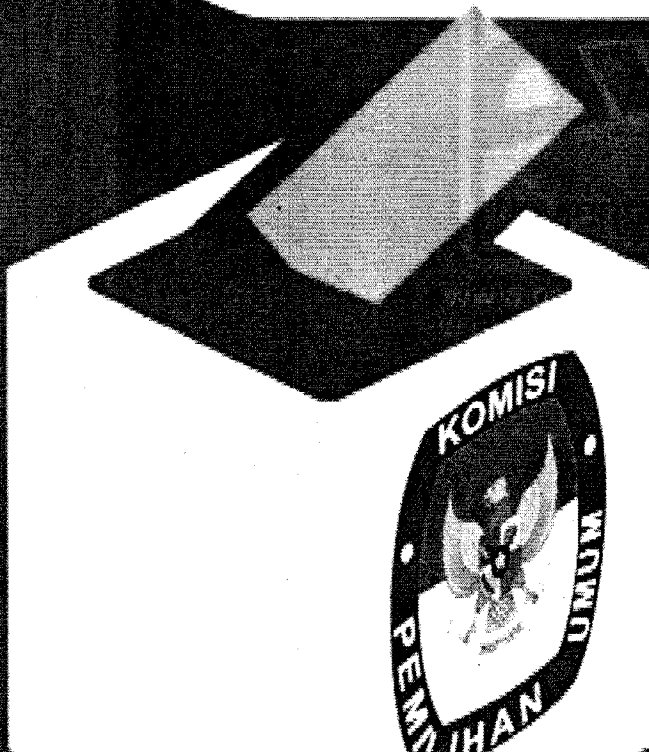
-
- a. Melaksanakan kegiatan rapat-rapat/bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja ;
 - b. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran dan *disbursement plan*.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Provinsi Jawa Timur.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

satu
suara
untuk bangsa



Sebagai insan muda penerus bangsa,
kita juga punya hak untuk bersuara.
Ayo, gunakan satu suara kita sebaik
mungkin untuk Indonesia tercinta.

Ditentukan
Februari 2016

KPU PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Tenggilis No. 1 – 3 Surabaya
Telp. 031 – 8484825, 27, 28
Fax. 031 – 8484826

Lampiran 1 :

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Lampiran 1 :



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo

Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eko Sasmito, SH, MH

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

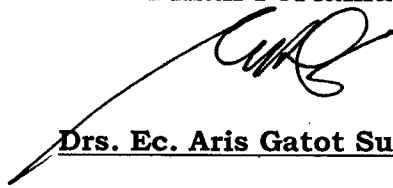
Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Eko Sasmito, SH, MH

**Surabaya, Februari 2015
Pihak Pertama**


Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

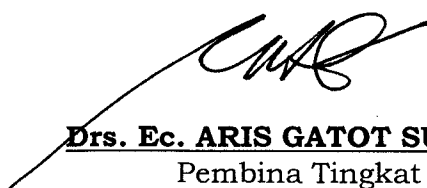
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo

Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015 ini saya berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, Februari 2015
Plt. SEKRETARIS,


Drs. Ec. ARIS GATOT SUBAGYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19590505 199203 1 007

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI : JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2015

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Transparansi dan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Adminstrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	1 Laporan 100 %
	laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 Laporan 100%
	ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	12 Layanan Bulan 100%
Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.	Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.	1 Dokumen 77.5%
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 Dokumen 77.5%
	Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan 77.5%
Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.	5 Laporan 90%
	Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.	100 orang 100%

	Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU	1 Orang 90 %
	Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Daerah Pemekaran	5 Orang 90%
	Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan	1 Dokumen 90%
Tereselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari Untuk KPU Seluruh Indonesia	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.	3 Dokumen 90 %
	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	3 Laporan 100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Trampil dalam rangka Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	2 Orang 100 %
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	1 Laporan 100%
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	12 Layanan Bulan 100%
	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1 Laporan 100%
Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel		

Terselenggaraanya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	5 Kasus	90%
	Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Adminstrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan	85%
	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1 Provinsi	90%
Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat	50 Orang	100 %
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	1 Satker	100%
	Jumlah pusat pendidikan pemilih	1 Satker	80%
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	75%

Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 5.741.770.000

PROSENTASE DIAMBIL DARI APLIKASI DIPA di rencana kinerja di IKKNya

Surabaya, Februari 2015
Plt. SEKRETARIS

Drs. Ec. ARIS GATOT SUBAGYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19590505 199203 1 007

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI : JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2015

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program /Kegiatan (4)	Anggaran (5)
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Transparansi dan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Adminstrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	1 Laporan 100 %	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Rp 92,992,000
	laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 Laporan 100%	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 47,704,000
	ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	12 Layanan Bulan 100%	Layanan Perkantoran[Base Line]	Rp 2,723,785,000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu	Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.	1 Dokumen 77.5%	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu[Base Line]	Rp 107,987,000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 Dokumen 77.5%	Dokumen perencanaan dan data kepengmilian[Base Line]	Rp 160,662,000
	Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan 77.5%	Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 55,852,000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.	5 Laporan 90%	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.[Base Line]	Rp 67,180,000
	Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.	100 orang 100%	Layanan peningkatan kompetensi SDM[Base Line]	Rp 118,592,000
	Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU	1 Orang 90 %	Layanan pengadaan pegawai baru[Base Line]	Rp 114,409,000
	Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Daerah Pemekaran	5 Orang 90%	Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.[Base Line]	Rp 6,650,000
	Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan	1 Dokumen 90%	Dokumen kepegawaian[Output Baru - Penambahan Anggaran]	Rp 23,650,000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Tereselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari Untuk KPU Seluruh Indonesia	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.	3 Dokumen 90 %	Penatausahaan Barang Milik Negara[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 95,913,000
	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	3 Laporan 100%	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 4,467,000
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Trampil dalam rangka Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU	2 Orang 100 %	Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 19,556,000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU	1 Laporan 100%	Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 56,760,000

	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	12 Layanan Bulan 100%	Layanan Perkantoran[Base Line]	Rp 1,105,800,000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1 Laporan 100%	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Rp 232,206,000
			Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	
Terselenggaraanya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	5 Kasus 90%	Advokasi dan Sengketa Hukum[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 125,958,000
	Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan 85%	Layanan Administrasi kepiluan[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 9,000,000
	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1 Provinsi 90%	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 110,788,000
			Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	
Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat	50 Orang 100 %	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.[Base Line]	Rp 80,878,000
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	1 Satker 100%	Pembentukan PPID[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 91,905,000
	Jumlah pusat pendidikan pemilih	1 Satker 100%	Pusat pendidikan pemilih[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 36,191,000
	%Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan 75%	Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp 252,885,000
				Rp 5,741,770,000

Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 5.741.770.000

PROSENTASE DIAMBIL DARI APLIKASI DIPA di rencana kinerja di IKKnya

Surabaya, Februari 2015
Pit. SEKRETARIS

Drs. Ec. ARIS GATOT SUBAGYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19590505 199203 1 007

LAMPIRAN 2 :**2.1. PENGUKURAN KINERJA KPU TAHUN 2015 (RENSTRA 2010 – 2014)**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;	75	62,73	80,94
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;	70	53,80	71,73
3	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	2	0,37	123,3
4	Persentase kasus gugatan hokum dan sengketa hokum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	85	75	88,23
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	-

2.2. PENGUKURAN KINERJA KPU TAHUN 2015 (RENSTRA 2015 – 2019)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;	77.5	62,73	80,94
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada ;	75	53,80	71,73
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	75	35,40	47,2
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	0.3	0,37	123,3
		KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.	100	100	100
2.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;	60	57,6	96
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100	100	100
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu dan Pemilukada;	3	0	0
		Opini BPK atas LHP;	WTP	WDP	-
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu dan Pemilukada;	-	-	-

		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	90	90	100
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.	86	54	62,79

LAMPIRAN 3 :
PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT KPU TAHUN 2015.

Sasaran Program/ Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% Capaian (5)	Program /Kegiatan (6)	Anggaran (Rp) (7)	Realisasi (Rp.) (8)	Capaian % (9)
Transparansi dan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 Laporan 100 %	1 Laporan	100	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	92,992,000	85,148,970	91.57
	Laporan per-tanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	1 Laporan 100%	1 Laporan	100	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	47,704,000	43,961,300	92.15
	Laporan pengelolaan hibah pemilihan	2 laporan	2 Laporan	100	Pengelolaan hibah pemilihan	379,466,000	308,637,000	81.33
	Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	12 Layan an Bulan 100%	12 Layanan Bulan	100	Layanan Perkantoran [Base Line]	25,348,804,000	24,874,576,745	98.13

Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.	Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang mampu melakukan pe- meliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.	1 Dokumen 77.5%	2 Dokumen	100	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]	107,987,000	81,673,850	75.63
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.	Prosentase kesesuai an antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 Dokumen 77.5%	2 Dokumen	155	Dokumen perencanaan- an dan data kepemilu an [Base Line]	160,662,000	116,815,040	72.71
	Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Timur	1 Dokumen	2 Dokumen	200	Dokumen pemutakhiran data pemilih	158,972,000	120,912,150	76.06
	Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan 77.5%	2 Laporan	155	Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	55,852,000	27,497,200	49.23



Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.	5 Laporan 90%	6 Laporan	108	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. [Base Line]	166,877,000	122,807,800	73.59
	Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.	100 orang 100%	150 orang	150	Layanan peningkatan kompetensi SDM [Base Line]	306,062,000	270,060,000	88.24
	Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU	1 Orang 90 %	3 orang	270	Layanan pengadaan pegawai baru [Base Line]	32,162,000	7,736,000	24.05
	Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Daerah Pemekaran	5 Orang 90%	0	0	Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. [Base Line]	4,850,000	-	-



	Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan	1 Dokumen 90%	1 Dokumen	90	Dokumen kepegawaian [Output Baru - Penambahan Anggaran]	23,650,000	15,095,000	63.83
Tereselenggara- nya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari Untuk KPU Seluruh Indonesia	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadminis- trasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.	3 Dokumen 90 %	3 Dokumen	90	Penatausahaan Barang Milik Negara [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	95,913,000	19,845,000	20.69
	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	3 Laporan 100%	3 Laporan	100	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	4,467,000	-	-
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Trampil dalam rangka Penyelenggaraan/ penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	2 Orang 100 %	2 Orang	100	Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	19,556,000	-	-

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan/ penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	1 Laporan 100%	1 Laporan	100	Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip	56,760,000	55,170,000	97.20
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	12 Layanan Bulan 100%	12 Layanan Bulan	100	Layanan Perkantoran [Base Line]	1,276,800,000	1,056,521,434	82.75
Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1 Laporan 100%	1	100	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	348,034,000	222,341,440	63.88
Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	5 Kasus 90%	3 Kasus	54	Advokasi dan Sengketa Hukum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	125,958,000	77,510,700	61.54

	Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan 85%	1 Laporan	85	Layanan Administrasi kepemiluan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	9,000,000	2,498,500	27.76
	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1 Provinsi 90%	1 Prov. Dan 38 Kab/Kota	90	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	110,788,000	79,455,320	71.72
Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	50 Orang 100 %	4	10	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]	80,878,000	65,511,300	81.00
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah membentuk PPID	1 Satker 100%	1 Prov dan 38 Kab/kota	100	Pembentukan PPID [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	91,905,000	66,723,900	72.60

	Jumlah pusat pendidikan pemilih	1 Satker 100%	1 Satker	100	Pusat pendidikan pemilih [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	36,191,000	23,684,500	65.44
	% Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan 75%	3 Laporan	225,5	Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	252,885,000	191,425,726	75.70
	Jumlah kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan	5 Laporan	500	Tahapan Pemilihan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	833,752,000	662,290,800	79.43



PENGADAAN BARANG JASA TAHUN 2015 DENGAN NILAI KONTRAK DI ATAS Rp. 50.000.000,- UNTUK PENERAPAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KPU
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

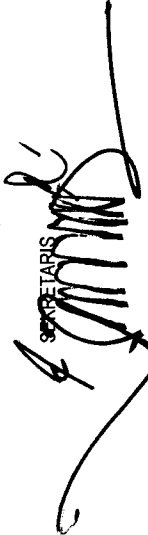
KL
UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
: KPU PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	TANGGAL DAN NO DIPA	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/AKUN	AKUN PAGU KONTRAK (DIPA)	KONTRAK			SISA Pagu Kontrak (DIPA)	Jumlah Sisa Pagu Kontrak (DIPA)	Penjelasan
				NILAI KONTRAK	Nomor dan Tanggal				
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1		3355.008.002.011.524114	281,808,000.00	62,335,000.00	07/SPK-PBJ/X/2015	1 OKTOBER 2015	219,473,000.00		
		Penyediaan Jasa Akomodasi Peserta dan Panitia Fullboard Meeting : Rapat Pembinaan Pengelolaan, Pelaporan Dana Hibah Untuk Pilkada Serentak Tahun Anggaran 2015/Implementasi Aplikasi SIKUBAH dan Evaluasi Agenda Kerja Tahun Anggaran 2015							
2		3355.008.002.011.524114		116,280,000.00	10/SPK-PBJ/XI/2015	3 NOVEMBER 2015	103,193,000.00		
		Fullboard Meeting : Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan, Pelaporan Dana Hibah/Implementasi Aplikasi SIKUBAH dan Pengelolaan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2015							
3		3355.008.002.011.524114	61,650,000.00	43,750,000.00	15/SPK-PBJ/XII/2015	17 DESEMBER 2015	59,443,000.00	59,443,000.00	
		Fullboard Meeting : Rapat Koordinasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran/Dana Hibah Pilkada Serentak Kab/Kota di Jawa Timur							
4		3356.008.001.011.524119		15,050,000.00	12/SPK-PBJ/XII/2015	1 DESEMBER 2015	46,600,000.00		
		Penyediaan konsumsi : Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Pemungutan, Penghitungan Suara dan Progress Report Distribusi Logistik Pilkada Serentak di Jawa Timur Tahun 2015							
5		3356.008.001.011.524119							
		Penyediaan Jasa Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Evaluasi Pengelolaan Logistik PEMILU Tahun 2014 dan Koordinasi Pilkada Tahun 2015 Di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur							
				36,860,000.00	06/SPK-PBJ/VI/2015	5 JUNI 2015	9,740,000.00	9,740,000.00	
6		3357.001.001.011.A.521811	14,478,000.00	12,300,000.00	11/SPK-PBJ/XII/2015	1 DESEMBER 2015	2,178,000.00	2,178,000.00	
		Penyediaan Konsumsi Rapat Kerja : Evaluasi Kinerja dan Penyerahan Pagu Indikatif Tahun 2016, serta Penyerahan dan Validasi Daftar Absensi Tunjangan Kineja (TUKIN)							
7		3357.010.001.011.532111	115,120,000.00	112,153,800.00	13/SPK-PBJ/XII/2015	2 DESEMBER 2015	2,966,200.00	2,966,200.00	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Pembelian Server dan Perangkat Pendukungnya pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih							
8		3358.003.001.011.B.524114	82,100,000.00	34,000,000.00	08/SPK-PBJ/X/2015	12 OKTOBER 2015	48,100,000.00		
		PENYEDIAAN JASA AKOMODASI PESERTA DAN PANITIA FULLBOARD MEETING : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR TAHUN 2015							
9		3358.003.001.011.B.524114		38,400,000.00	09/SPK-PBJ/X/2015	15 OKTOBER 2015	9,700,000.00	9,700,000.00	
		PENYEDIAAN JASA AKOMODASI PESERTA DAN PANITIA FULLBOARD MEETING : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAN KPU KAB/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2015							

NO.	TANGGAL DAN NO DIPA	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/AKUN	AKUN PAGU KONTRAK (DIPA)	KONTRAK		SISA Pagu Kontrak (DIPA)	Jumlah Sisa Pagu Kontrak (DIPA)	Penjelasan
				NILAI KONTRAK	Nomor dan Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		3358.003.001.011.B.524119 Penyediaan akomodasi dan konsumsi : Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Aparatur di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur (Outbound)	101,046,000.00	69,075,000.00	14/SPK-PBJ/XII/2015	31,971,000.00	31,971,000.00	
11		3360.015.011.532111 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN FOTO COPY DI KPU PROVINSI JAWA TIMUR	29,000,000.00	19,965,000.00	01/SPK-PBJ/IV/2015	9,035,000.00		
12		3360.015.011.532111 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN LEMARI ARSIP KACA SLIDING DI KPU PROVINSI JAWA TIMUR		8,910,000.00	03/SPK-PBJ/IV/2015	125,000.00	125,000.00	
13		3360.994.001.002.521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA PENGADAAN SERAGAM KERJA DI KPU PROVINSI JAWA TIMUR	53,000,000.00	48,543,000.00	04/SPK-PBJ/IV/2015	4,457,000.00	4,457,000.00	
14		3361.005.001.011.A.524111 Pengadaan Jasa Akomodasi Kegiatan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	100,936,000.00	83,135,000.00	05/SPK-PBJ/IV/2015	17,801,000.00	17,801,000.00	
15		3364.027.013.532111 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PRINTER DAN KOMPUTER DI KPU PROVINSI JAWA TIMUR	12,500,000.00	12,446,500.00	02/SPK-PBJ/IV/2015	53,500.00	53,500.00	
		JUMLAH	851,638,004.00	713,203,305.00			138,434,708.00	

Surabaya 20 Januari 2016

SEKRETARIS



MUHAMMAD EBERTA KAWIMA

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

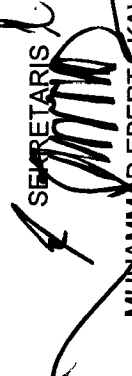
KPU PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Kode	Output 2015	Pagu Anggaran Setelah Revisi 2015 (2)	REALISASI		SISA (KURANG/LEBIH)	KENDALA
				Rp.	%		
I.	076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	28,687,570,000	27,428,798,929	95.61	1,245,366,071	
1	3355	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	25,868,966,000	25,312,324,015	97.85	556,641,985	
	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	92,992,000	85,148,970	91.57	7,843,030	
	3355.007	Laporan Pertanggung- jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	47,704,000	43,961,300	92.15	3,742,700	
	3355.008	Pengelolaan Hibah Pemilihan (Laporan)	379,466,000	308,637,000	81.33	70,829,000	
	3355.994	Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	25,348,804,000	24,874,576,745	98.13	474,227,255	
2	3356	Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	107,987,000	81,673,850	75.63	26,313,150	
	3356.008	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik PEMILU (dokumen).	107,987,000	81,673,850	75.63	26,313,150	
3	3357	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	375,486,000	265,224,390	70.63	110,261,610	
	3357.001	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	160,662,000	116,815,040	72.71	43,846,960	
	3357.010	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilihan (Dokumen)	158,972,000	120,912,150	76.06	38,059,850	

	3357.018	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU	55,852,000	27,497,200	49.23	28,354,800	
4	3358	Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	533,601,000	415,698,800	77.90	104,497,200	
	3358.001	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	166,877,000	122,807,800	73.59	44,069,200	
	3358.003	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	306,062,000	270,060,000	88.24	36,002,000	
	3358.004	Layanan Pengadaan Pegawai Baru	32,162,000	7,736,000	24.05	24,426,000	
	3358.005	PAW ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KAB/KOTA	4,850,000	-	-	4,850,000	
	3358.006	Dokumen Kepegawaian	23,650,000	15,095,000	63.83	8,555,000	
5	3360	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	1,453,496,000	1,131,536,434	77.85	321,959,566	
	3360.008	Penataan Barang Milik Negara	95,913,000	19,845,000	20.69	76,068,000	
	3360.010	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN	4,467,000	-	-	4,467,000	
	3360.014	Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan	19,556,000	-	-	19,556,000	
	3360.015	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	56,760,000	55,170,000	97.20	1,590,000	
	3360.994	Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)	1,276,800,000	1,056,521,434	82.75	220,278,566	
6	3361	Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	348,034,000	222,341,440	63.88	125,692,560	
	3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	348,034,000	222,341,440	63.88	125,692,560	
II.	076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1,541,357,000	1,169,100,746	75.85	372,256,254	

7	3363	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	245,746,000	159,464,520	64.89	86,281,480	
	3363.010	Advokasi dan sengketa hukum (kasus)	125,958,000	77,510,700	61.54	48,447,300	
	3363.011	Layanan Administrasi Kepemiluan (laporan)	9,000,000	2,498,500	27.76	6,501,500	
	3363.013	Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (Provinsi)	110,788,000	79,455,320	71.72	31,332,680	
8	3364	TKegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1,295,611,000	1,009,636,226	77.93	285,974,774	
	3364.004	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (orang)	80,878,000	65,511,300	81.00	15,366,700	
	3364.027	Pembentukan PPID (Satker)	91,905,000	66,723,900	72.60	25,181,100	
	3364.032	Pusat Pendidikan Pemilih (Satker)	36,191,000	23,684,500	65.44	12,506,500	
	3364.033	Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (laporan)	252,885,000	191,425,726	75.70	61,459,274	
	3364.034	Tahapan Pemilihan (Laporan)	833,752,000	662,290,800	79.43	171,461,200	
		JUMLAH	30,228,927,000	28,597,899,675	94.60	1,617,622,325	

Surabaya, Januari 2016

SEKRETARIS

 MUHAMMAD EBERTA KAWIMA
 NIP. 19660423 199403 1 005